



**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Fatah Cahya Purnama

NIM. 100810301100

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Abdul Fatah Cahya Purnama

NIM. 100810301100

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua (Tri Sukmono Singgih dan Zulaichah Ahmad) yang sangat saya sayangi, terima kasih atas semua kasih sayang dan lantunan do'a yang senantiasa mendampingi setiap langkahku.
2. Dosen pembimbing (Drs. Sudarno, M.Si, Ak. dan Andriana SE, M.Sc.) yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Alumni tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan tetap menegakkan shalat, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al Baqarah : 153)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap”

(Q.S. Al Insyirah : 5-8)

Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

(HR. Thabrani)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Fatah Cahya Purnama

NIM : 100810301100

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2015

Yang Menyatakan,

Abdul Fatah Cahya Purnama

NIM. 100810301100

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (STUDI
KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER)

Nama Mahasiswa : Abdul Fatah Cahya Purnama
Nomor Induk Mahasiswa : 100810301100
Jurusan : Akuntansi / S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 18 Maret 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Sudarno, M.Si., Ak.

NIP. 196012251989021001

Andriana, S.E., M.Sc.

NIP. 198209292010122002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP. 197107271995121001

SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)**

Oleh

ABDUL FATAH CAHYA PURNAMA

100810301100

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Sudarno, M.Si., Ak

Dosen Pembimbing II : Andriana, SE., M.Sc.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Fatah Cahya Purnama

NIM : 100810301100

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Juni 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, S.E., M.Sc., Ak. (.....)

NIP. 198306242006041001

Sekretaris : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. (.....)

NIP. 196408091990032001

Anggota : Kartika, S.E., M.Sc., Ak. (.....)

NIP. 198202072008122002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. M. Fathorrazi, S.E, M.Si
NIP 19630614 199002 1 001

Abdul Fatah Cahya Purnama

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Amanat Undang-undang No. 17 tahun 2013 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan basis akrual selambat-lambatnya 5 tahun setelah Undang-undang ini ditetapkan. Pada entitas pemerintahan penggunaan basis akrual sebagai basis pencatatan akuntansi diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pemerintahan Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode analisis data menggunakan analisis dekriptif kualitatif.

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dilihat dari parameter komitmen adalah kategori siap, dari parameter SDM adalah kategori tidak siap, dari parameter sarana dan prasarana adalah kategori tidak siap, dan dari parameter sistem informasi adalah kategori siap. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain, Bagian keuangan belum memiliki staff berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, penempatan pegawai bagian keuangan belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, minimnya pemahaman PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, bagian keuangan belum memiliki sarana yang cukup memadai dalam penerapan SAP Berbasis Akrual, pengolahan data transaksi keuangan masih dilakukan secara manual (excel), kebijakan dan prosedur akuntansi SAP berbasis akrual belum dipahami oleh seluruh pegawai keuangan.

Kata Kunci : Basis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kesiapan, Komitmen, SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi.

Abdul Fatah Cahya Purnama

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

The mandate of Law No. 17 of 2013 states that the Indonesian government must implement the financial management of the country on an accrual basis no later than five years after the law's enactment. On government entities use accrual basis accounting as the basis set out in Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards (SAP) Accrual Based. The purpose of this study was to determine the readiness of the Government of Jember indicated with commitment, Human Resources, infrastructure and information systems and to determine obstacles in the implementation of Regulation No. 71 Year 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP).

Type of research is descriptive qualitative research. This research was conducted by taking the object in Jember District Government. The type of data used in this study are primary data. Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis.

Jember Regency Government readiness is indicated by the commitment, human resources, infrastructure and information systems can be concluded that the Government of Jember seen from the parameter commitment is prepared categories, from Human Resources parameter is not prepared categories, from the parameters of infrastructure is not ready category, and from parameter information system is ready category. Constraints in the implementation of Regulation No. 71 Year 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP), among others, finance department has not had a qualified staff in sufficient numbers, staffing the finance department is not supported by an appropriate educational background, lack of understanding of the PP 71 Year 2010 concerning Governmental Accounting Standards (SAP) Accrual Based, financial part not yet have adequate facilities in the implementation of Accrual Based SAP, data processing financial transactions are still done manually (excel), accounting policies and procedures accrual-based SAP is not yet understood by all keuangan employees.

Keywords: *Accrual Basis, the Government Accounting Standards, Readiness, Commitment, Human Resources, Facilities and Infrastructure, Information Systems.*

RINGKASAN

Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahn Berbasis Akrua (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember); Abdul Fatah Cahya Purnama, 100810301100; 2015; 68 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua. Pemerintah merencanakan bahwa SAP berbasis akrua selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP akrua.

Tujuan penelitian ini pada akhirnya adalah untuk mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrua. Parameter yang digunakan untuk menilai kesiapan tersebut meliputi komitmen, SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi. Selain itu penelitian ini juga akan menggambarkan kondisi dan hambatan-hambatan yang terjadi selama masa persiapan penerapan SAP akrua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari wawancara.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jika dilihat dari segi komitmen, SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi maka Pemerintah Kabupaten Jember secara umum dapat dikategorikan siap. Hal itu mengindikasikan bahwa sebagian besar SKPD masih belum memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk menerapkan SAP berbasis akrua. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan SKPD yang dilihat dari parameter komitmen dikategorikan siap, parameter SDM dikategorikan tidak siap, parameter sarana dan prasarana dikategorikan tidak siap, dan parameter sistem informasi dikategorikan siap.

Kesimpulannya penerapan dan persiapan SAP akrua membutuhkan rencana yang matang dan komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah Pusat juga harus memberikan rencana kepastian dan segera menuntaskan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai landasan hukum yang sah dan acuan dalam pelaksanaan SAP akrua di daerah. Pemerintah daerah juga harus segera menyiapkan perencanaan yang memadai untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrua.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)”** yang telah disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember
2. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, S.E., MM., Ak., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Drs. Sudarno, M.Si, Ak. dan Andriana S.E, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Andriana, S.E., M.Sc. selaku dosen wali dan Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu dalam memberikan informasi penting yang berkaitan dengan perkuliahan maupun sampai penyelesaian tugas akhir.
7. Kedua Orangtuaku Ibu (Zulaichah Ahmad) dan Bapak (Tri Sukmono Singgih) yang dengan sabar dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayangnya dan dukungan berupa materi maupun semangat dan doa dalam menyelesaikan studi.
8. Sahabat-sahabat S1 Akuntansi 2010 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini.
9. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini, sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca.

Jember, 18 Maret 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Akuntansi pada Pemerintah Daerah	8
2.1.1 Pemerintah Daerah	8
2.1.2 Perkembangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah	8
2.1.3 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan	11
2.1.4 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan	14
2.1.5 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan	15
2.1.6 Pengertian Akuntansi Berbasis AkruaI	16
2.1.7 Kelebihan dan Kelemahan Akuntansi Berbasis AkruaI	16
2.1.8 Pengertian Standar Akuntansi Berbasis AkruaI..	18
2.1.9 Komponen Laporan Keuangan Berbasis AkruaI dalam PP No 71 Tahun 2010	20
2.1.10 Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 71 Tahun 2010)	24
2.2 Parameter Kesiapan Penilaian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	24

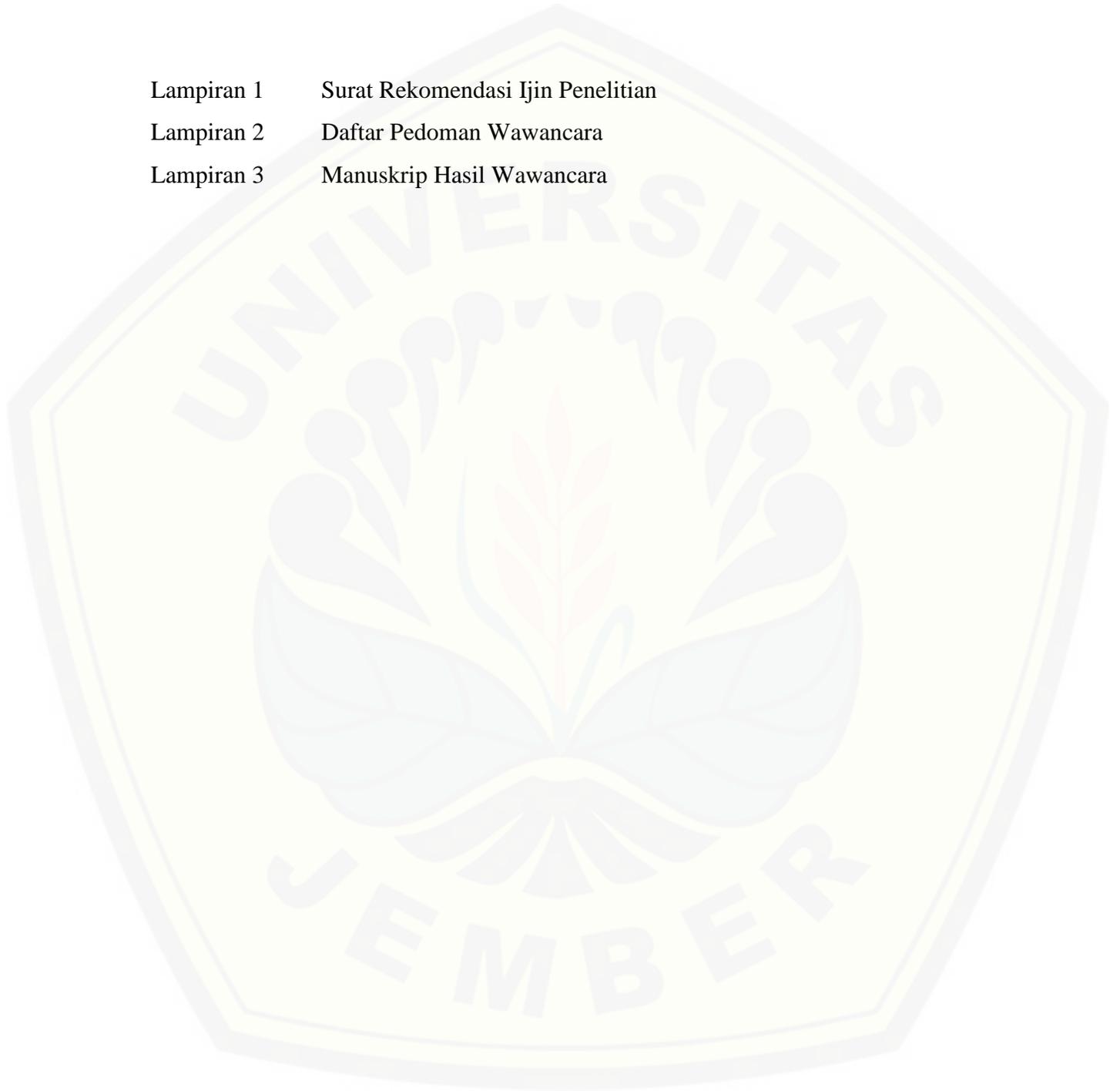
2.2.1	Komitmen	25
2.2.2	Sumber Daya Manusia	27
2.2.3	Sarana dan Prasarana	29
2.2.4	Sistem Informasi	31
2.3	Penelitian Terdahulu	33
BAB 3.	METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Instrumen Penelitian	34
3.3	Obyek Penelitian	35
3.4	Sumber Data dan Informan	35
3.5	Definisi Parameter Penilaian Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual	35
3.6	Metode Pengumpulan Data	37
3.7	Skala Pengukuran	37
3.8	Metode Analisis Data	38
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Hasil Penelitian	40
4.1.1	Penyajian Data	40
4.1.2	Analisis Data	43
4.1.3	Analisis Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual	57
4.2	Pembahasan	60
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Keterbatasan	65
5.3	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan Keuangan PP 24/2005 dengan PP 71/2010	21
Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual secara Bertahap	25
Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	38
Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	40
Tabel 4.2 Hasil Kesiapan Parameter Komitmen Tahun 2014	44
Tabel 4.3 Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	46
Tabel 4.4 Hasil Kesiapan Parameter Sumber Daya Manusia Tahun 2014	48
Tabel 4.5 Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	50
Tabel 4.6 Hasil Kesiapan Parameter Sarana dan Prasarana Tahun 2014	52
Tabel 4.7 Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	54
Tabel 4.8 Hasil Kesiapan Parameter Sistem Informasi Tahun 2014	55
Tabel 4.9 Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Rekomendasi Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Manuskrip Hasil Wawancara



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*). Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar

tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah

diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit. Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berbasis kas, sementara aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berbasis akrual.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus

timbul. Penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. Kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk mencapai hal ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia .

Salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya BPKAD (Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Pendukung yang akan membantu BPKAD dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya *computer* dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP.

Secara yuridis, keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasinya penuh di tahun 2015. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang

berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kabupaten Jember wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sistem informasi untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Pemilihan obyek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Jember karena pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan sorotan dalam laporan keuangan APBD tahun anggaran 2013 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hasil audit BPK laporan keuangan tahun anggaran 2013 menurun dibandingkan laporan keuangan tahun anggaran 2012 yang mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Menurut Kepala Badan Perencanaan dan

Pembangunan Kabupaten Jember (Edy Budi Susilo), seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) harus melakukan koreksi terhadap pengelolaan keuangan di masing-masing unit kerja dan menindaklanjuti temuan BPK terkait dengan ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Jember tahun anggaran 2013.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik menganalisis persiapan Pemerintah Kabupaten Jember untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Selanjutnya, penulis melakukan identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan basis akrual. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Kehadiran Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mewajibkan pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Jember untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015 nanti. Penerapan basis akrual yang sesuai diamanahkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini memerlukan berbagai persiapan untuk menuju ke arah tersebut.

Pentahapan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep yang diberikan oleh KSAP per tiap tahun dari program yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat sesuai dengan tujuan laporan keuangan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi pada Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah yang meliputi gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

2.1.2 Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintahan Daerah

Dalam pemerintahan daerah diperlukan standar akuntansi yang mengatur pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah. Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Menurut Halim (2004) pada sistem pencatatan ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Hasil dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap yang dimiliki dan ekuitas. Sehingga selama itu pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai

salah satu bentuk laporan keuangan guna menggambarkan posisis keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas.

Menurut Bastian (2006), basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kaskeluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan data tentang aset dan kewajiban. Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 khususnya pada pasal 30,31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 184 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dilanjutkan dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan

daerah. Pada pasal 81 mengatur laporan keuangan Pemerintah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sedangkan untuk pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara juga telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Guna membentuk KSAP telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005.

Setelah kurang lebih lima tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang harus dipahami adalah:

a. Laporan keuangan pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang lama (PP Nomor 24 Tahun 2005) terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Neraca
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru (PP Nomor 71 Tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

b. Hubungan antar laporan keuangan terbagi atas laporan:

- 1) Laporan finansial
LO → LPE → Neraca
 - 2) Laporan pelaksanaan anggaran
LRA → Laporan Perubahan SAL
- c. Basis pencatatan yang digunakan pada standar akuntansi pemerintah lama yaitu basis kas menuju akrual. Sedangkan pada SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.
- d. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan neraca dan laporan operasional menggunakan basis akrual. (Hafiz Tanjung, 2012).

2.1.3 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan syarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah di Indonesia. Dalam memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite SAP. Komite SAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP (Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010).

Komite standar akuntansi pemerintahan (SAP) terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. Komite SAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Dengan demikian, Komite SAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standart tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada IPSAS. Selain itu dalam penyusunannya, SAP juga telah diharmoniskan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. Dalam menyusun SAP, Komite SAP menggunakan materi yang diterbitkan oleh:

- a) *International Federation of Accountant*
- b) *International Accounting Standards Committee*
- c) *International Monetary Fund*
- d) IAI
- e) *Financial Accounting Standards Board*
- f) *Governmental Accounting Standards Board*
- g) Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku di Republik Indonesia
- h) Organisasi profesional lainnya di berbagai Negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan. (Noerdiawan, 2007).

Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Saat ini,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berbasis kas, sementara aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berbasis akrual.

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Berikut adalah proses penyusunan SAP:

- a) Identifikasi topik.
- b) Konsultasi topik kepada komite pengarah.
- c) Pembentukan kelompok kerja.
- d) Riset terbatas oleh kelompok kerja
- e) Draf awal dari kelompok kerja.
- f) Pembahasan draf awal oleh komite kerja.
- g) Pengambilan keputusan oleh komite kerja.
- h) Pelaporan kepada komite pengarah dan persiapan atas draf publikasian
- i) Peluncuran draf publikasian.
- j) Dengar pendapat publik dan dengar pendapat terbatas.
- k) Pembahasan tanggapan dan masukan atas draf publikasian dari dengar pendapat.
- l) Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- m) Pembahasan tanggapan BPK.
- n) Finalisasi standar.
- o) Pemberlakuan standar.
- p) Sosialisasi awal standar.

SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan, yaitu:

- a) PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
- b) PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
- c) PSAP 03 : Laporan Aliran Kas

- d) PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
- e) PSAP 05 : Akuntansi persediaan
- f) PSAP 06 : Akuntansi Investasi
- g) PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
- h) PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i) PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
- j) PSAP 10 : Koreksi Kesalahan
- k) PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

(Noerdiawan, 2007).

2.1.4 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan

Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh ikatan akuntan indonesia, kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu, badan akuntansi keuangan negara (BAKUN), kementerian keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti dalam organisasi komersial (*commercial organization*), para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar, 2001).

Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP tentang SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Nordiawan (2006), beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah

dilakukan dengan baik oleh ikatan akuntan indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri. Diperlukannya paket standar akuntansi tersendiri karena adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, yang diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

Mahsun dkk. (2007:11) menyebutkan berbagai organisasi di Indonesia yang termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan, dan organisasi-organisasi massa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, merupakan bagian dari organisasi sektor publik, sehingga diperlukan juga standar akuntansi tersendiri.

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan *audit* di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP. (Nordiawan dkk, 2007).

2.1.5 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP yang diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinas yang terkait. Dengan dilakukannya penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.1.6 Pengertian Akuntansi Berbasis Akrua

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP (2006:3), adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Halim dan Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu, basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas antara lain tujuan manajerial dan pengawasan.

2.1.7 Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Menurut KSAP (2006:1), dalam wacana akuntansi, secara konseptual

akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002:155), pengaplikasian *accrual* basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*. Penentuan hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual* basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan (*proper matching cost against revenue*). Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba (*profit oriented*), sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (*public service oriented*).

Menurut Bastian (2006:118-119), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis

adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Kemudian menurut Bastian (2006:120), beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

2.1.8 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual terdapat pada lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Sementara lampiran III ditujukan sebagai referensi untuk memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Ritonga (2010) yang menyatakan bahwa, apabila Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis akrual, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada

saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut pemaparan di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Dalam standar akuntansi pemerintahan jika menggunakan basis akrual, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda (kas dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003) dalam Mardiasmo (2006). Di samping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Dengan demikian Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh

beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang.

Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karenanya, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP, 2006). Widjajerso (2008) menjelaskan alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

2.1.9 Komponen Laporan Keuangan Berbasis Akrual dalam PP No. 71 Tahun 2010

Perbedaan komponen laporan keuangan antara PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010 tampak pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perbedaan Komponen Laporan PP 24/2005 dengan PP 71/2010

PP 24/2005	PP 71/2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok:	Komponen Laporan Keuangan Pokok:
1. Neraca	A. Laporan Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Arus Kas	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
4. Catatan atas Laporan Keuangan	B. Laporan Finansial
Laporan yang bersifat optional	1. Neraca
1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK)	2. Laporan Operasional (LO)
2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	3. Laporan Arus Kas (LAK)
	4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	C. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber : PP Nomor 71 Tahun 2010

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah yang berbeda dengan PP 24/2005, yaitu :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- 1) Saldo anggaran lebih awal
- 2) Penggunaan saldo anggaran lebih
- 3) Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- 5) Saldo anggaran lebih akhir

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.

3) Surplus/defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.

4) Kegiatan non operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luarbiasa.

5) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

6) Pos luar biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luarbiasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

7) Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekuitas akhir

2.1.10 Strategi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010)

Menurut KSAP (2010), strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (*bigbang*) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian/lembaga.
- b. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua kementerian/lembaga pada tahun 2015.

Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akruaal secara Bertahap

Tahun	Keterangan
2010	a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual; b. Mengembangkan <i>framework</i> akuntansi berbasis akrual; c. Sosialisasi SAP berbasis akrual.
2011	a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi; b. Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail <i>requirement</i>); c. Pengembangan kapasitas SDM.
2012	a. Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan); b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan).
2013	a. Ploting beberapa KL dan BUN; b. Review, evaluasi dan konsolidasi seluruh LK; c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan).
2014	a. Pararel run dan konsolidasi seluruh LK; b. Review, evaluasi dan konsolidasi seluruh LK; c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan).
2015	a. Implementasi penuh; b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan).

Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akruaal.

2.2 Parameter Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal

Perubahan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat/daerah sudah sering mengalami perubahan untuk memperbaiki sistem pelaporan yang lebih

baik. Tujuan dari perubahan pedoman dasar penyusunan laporan keuangan pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintahan. Dalam setiap perubahan pedoman dasar laporan keuangan pemerintahan (pusat/daerah) selalu dibutuhkan penyesuaian untuk benar-benar diterapkan secara penuh. Perubahan pedoman dasar laporan keuangan pemerintahan dari PP Nomor 24 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dibutuhkan persiapan yang sangat baik.

Dalam persiapan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, ada beberapa parameter yang menjadi faktor utama dalam kesiapan penerapan secara penuh, yang meliputi : komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi.

2.2.1 Komitmen

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka, yaitu Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan dan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005). Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi (Mowday *et al.* dalam Darma, 2004). Menurut Ikhsan dan Ishak (2008) bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankankeanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan

organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya.

Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Wentzel, 2002). Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP.

Mowday, *et. al.* dalam Ikhsan dan Ishak (2008) mengemukakan bahwa: Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain :

- a. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
- b. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
- c. Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan dan bawahan dalam satuan kerja termasuk pimpinan SKPD penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang saling berhubungan dan berkesinambungan.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut merupakan suatu

perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat

dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Resistensi terhadap perubahan, sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Konsepsi tentang kebijakan komitmen pemerintah terkait dengan SAP berbasis akrual.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah pendukung utama penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diukur dengan aset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan SAP berbasis akrual (Grigg, 2000). Sarana dan Prasarana merujuk pada sistem fisik yang menunjang pelaksanaan teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi,

juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian atas keakurasian data.

Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000):

- a. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
- b. Keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
- c. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,

- d. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu,
- e. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
- f. Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak.
- g. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

2.2.4 Sistem Informasi.

Menurut Mukhtar (2002: 4), sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Hal

tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan, “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Mukhtar (2002), suatu sistem informasi dapat dibagi menurut keberadaannya di suatu perusahaan. Ada sistem informasi informal dan sistem informasi formal. Sistem informasi informal keberadaannya di suatu organisasi tidak diakui secara resmi dan informasi yang dihasilkan seringkali mendukung informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi formal. Sedangkan sistem informasi formal secara eksplisit diakui keberadaannya di perusahaan dan bertanggung jawab untuk menghasilkan informasi.

Selain itu sistem informasi juga dibagi berdasarkan proses yang dijalankan untuk mendapatkan informasi, yaitu sistem informasi manual semua proses untuk memproduksi informasi tidak menggunakan mesin atau komputer, maka sistem informasi otomatis melibatkan mesin atau komputer dalam memproduksi informasi.

Sistem informasi mempunyai komponen yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Tujuan sistem informasi (Jogiyanto, 2001):

- a. Sistem informasi bisa meningkatkan produk dan jasa.
- b. Sistem informasi bisa meningkatkan efisiensi.
- c. Sistem informasi bisa meningkatkan proses kerja manajemen.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tim penelitian Kemendagri (2012) melakukan penelitian tentang kesiapan pemerintah dari pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang dilakukan pada beberapa provinsi, yaitu : Provinsi DIY, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara dengan masing-masing menggunakan sampel 1 kabupaten atau kota dalam masing-masing provinsi yang bersangkutan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya siap dan berkomitmen dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual, ini ditunjukkan dengan kondisi-kondisi strategis seperti komitmen dari pemerintah, regulasi kebijakan yang digunakan, Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang menunjang penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Sementara itu, kendala yang dihadapi antara lain : pengetahuan/pemahaman SDM tentang SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang disebabkan karena kurangnya pelatihan/bimbingan teknis (bintek). Pemerintah daerah kurang memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP serta belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi hingga kota/kabupaten.

Strategi dasar yang dapat dipergunakan untuk kesiapan penerapan SAP berbasis akrual penuh termasuk dalam kategori strategi agresif, yaitu dengan mengandalkan SDM yang memahami regulasi di bidang keuangan daerah dan akuntansi.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dekriptif kualitatif dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Dengan demikian diharapkan fenomena tentang kesiapan Pemda dalam implementasi SAP, kendala-kendala yang dihadapi di daerah dapat dideskripsikan secara gamblang untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan.

Menurut Bungin (2008), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu dan mempunyai sifat-sifat tertentu, sebagai berikut:

- a. memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa yang akan sekarang (masalah-masalah aktual),
- b. data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis.

Pelaksanaan penelitian-penelitian deskriptif ini tidak hanya terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, namun data yang diperoleh kemudian dipaparkan, dan peneliti melakukan interpretasi data untuk mendapatkan pemahaman yang memadai.

3.2 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jember.

3.4 Sumber Data dan Informan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui wawancara. Data ini diperoleh dari wawancara responden.

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada kasubag dan bendahara bagian keuangan SKPD. Adapun yang dijadikan objek penelitian antara lain SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 Definisi Parameter Penilaian Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua

Parameter penilaian kesiapan penerapan SAP berbasis akrua diukur dengan komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Komitmen

Menurut Ikhsan dan Ishak (2008) bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya.

b. Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2000:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan diwajibkan

untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa, apalagi menjelang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Resistensi terhadap perubahan. Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Konsepsi tentang Kebijakan komitmen Pemerintah terkait dengan SAP berbasis akrual.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah pendukung utama penerapan sistem akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diukur dengan aset fisik yang penting dalam kelancaran penerapan SAP berbasis akrual (Grigg, 2000).

d. Sistem Informasi

Menurut Mukhtar (2002: 4), sistem informasi adalah sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundangundangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh". SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah wawancara.

3.7 Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data, seperti tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Instrumen Penilaian Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

No	Hal yang dinilai	Rating		Jumlah Respon- den	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Kategori
		2	1				
1.	Komitmen						
2.	Sumber Daya Manusia						
3.	Sarana dan Prasarana						
4.	Sistem Informasi						

Keterangan Kategori :

S = Siap

T = Tidak Siap

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang berlangsungnya proses penelitian dengan memulai mengumpulkan data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap kasubag atau bendahara bagian keuangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang berlangsungnya proses penelitian dengan cara:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kasubag atau bendahara bagian keuangan.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul dari hasil wawancara lalu dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan hasil jawaban wawancara.

c. Penyajian data (*display data*)

Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

d. Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan *display data*, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam teknik triangulasi sumber ini, peneliti membandingkan dan mengecek validasi data yang diperoleh melalui wawancara dari berbagai sumber.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada masing-masing SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember terhadap penilaian kesiapan parameter komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Rekapitulasi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

No	SKPD	Komitmen		SDM		Sarana dan Prasarana		Sistem Informasi	
		Siap	Tidak siap	Siap	Tidak Siap	Siap	Tidak Siap	Siap	Tidak Siap
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√		√		√		√	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√			√	√		√	
3	Badan Kepegawaian	√		√		√		√	
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat	√		√		√		√	
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	√			√	√		√	
6	Badan Perencanaan Pembangunan	√		√		√		√	
7	Badan Penanggulangan Bencana	√			√		√		√
8	Dinas Pendapatan	√		√		√		√	
9	Dinas Pendidikan	√		√		√		√	
10	Dinas Kesehatan	√		√		√		√	
11	Dinas Tenaga Kerja dan	√		√		√		√	

	Transmigrasi							
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√		√		√		√
13	Dinas Perhubungan	√		√		√		√
14	Dinas Pasar	√			√		√	√
15	Dinas Pertanian	√			√		√	√
16	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	√			√		√	√
17	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	√		√		√		√
18	Dinas Koperasi dan UMKM	√		√		√		√
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM	√		√		√		√
20	Dinas Sosial	√		√		√		√
21	DPU Bina Marga	√		√		√		√
22	DPU Cipta Karya	√			√		√	√
23	DPU Pengairan	√			√	√		√
24	Kantor Pemuda dan Olahraga	√		√		√		√
25	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	√		√		√		√
26	Kantor Perpustakaan	√			√	√		√
27	Kantor Lingkungan Hidup	√			√		√	√
28	Satpol PP	√			√		√	√
29	Bagian Pemerintahan Umum	√		√		√		√
30	Bagian Pemerintahan Desa	√		√		√		√
31	Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan	√		√		√		√
32	Bagian Humas	√		√		√		√
33	Bagian Kesra	√		√		√		√
34	Bagian Organisasi	√		√		√		√
35	Bagian Umum	√		√		√		√
36	Bagian Pembangunan	√		√		√		√
37	Bagian Hukum	√		√		√		√
38	RSD. Dr. Soebandi	√		√		√		√
39	RSD. Balung	√		√		√		√

40	RSD. Kalisat	√		√		√		√	
JUMLAH		40	0	29	11	33	7	37	3

Sumber : Hasil wawancara dengan pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten Jember.

Dari hasil tabel 4.1, dapat diketahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerepan SAP berbasis akrual yang dilihat berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, yang meliputi:

a. Parameter Komitmen

Dalam penilaian parameter komitmen, kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrual dapat ditekankan siap. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang menunjukkan semua SKPD Pemerintah Kabupaten Jember telah menyatakan berkomitmen melaksanakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

b. Parameter Sumber Daya Manusia

Dalam penilaian parameter sumber daya manusia, kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrual dapat dikategorikan tidak siap. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang menunjukkan bahwa, SKPD yang menyatakan siap sebanyak 29 SKPD dan yang menyatakan tidak siap sebanyak 11 SKPD.

Ketidaksiapan SKPD dalam menerapkan SAP berbasis akrual ini disebabkan karena bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan masih minimnya pemahaman tentang SAP berbasis akrual.

c. Parameter Sarana dan Prasarana

Dalam penilaian parameter sarana dan prasarana, kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrual dapat dikategorikan tidak siap. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang menunjukkan bahwa, SKPD yang

menyatakan siap sebanyak 33 SKPD dan yang menyatakan tidak siap sebanyak 7 SKPD.

Ketidaksiapan SKPD dalam menerapkan SAP berbasis akrual ini disebabkan karena bagian keuangan belum memiliki sarana dan prasaran yang mendukung dalam pelaksanaan tugas menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban, belum adanya dukungan yang baik dari sistem informasi yang terintegrasi dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban, dan pengolahan data transaksi masih dilakukan dengan cara manual.

d. Parameter Sistem Informasi

Dalam penilaian parameter sistem informasi, kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrual dapat dikategorikan siap. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang menunjukkan bahwa, SKPD yang menyatakan siap sebanyak 37 SKPD dan yang menyatakan tidak siap sebanyak 3 SKPD.

Ketidaksiapan SKPD dalam menerapkan SAP berbasis akrual ini disebabkan karena kurangnya dukungan sistem informasi manajemen yang mengakomodir pelaksanaan/penerapan SAP berbasis akrual, serta minimnya pemahaman tentang kebijakan dan prosedur akuntansi SAP berbasis akrual.

4.1.2 Analisis Data

a. Parameter Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara tentang kesiapan SKPD Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter komitmen menunjukkan bahwa seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan siap dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter komitmen. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter komitmen didukung dengan hasil wawancara dengan Kasubag Umum

dan Keuangan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (Didik Eko Pramono, SE.) selaku PPKD Pemerintah Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

“Komitmen sangat penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan faktor yang akan menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Jember.”

Menurut hasil wawancara dengan Kasubbag. Keuangan Dinas Kesehatan (Ucik Murbandiyah, SE.) selaku SKPD dari Pemerintah Kabupaten Jember mengatakan bahwa: “Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010.” Sedangkan menurut Kasubbag. Keuangan Dinas Pasar (Hidayat Rahman, S.Sos) mengatakan bahwa: “Komitmen kan kunci utama dalam suatu tujuan dari organisasi, jadi kami selalu memiliki komitmen dalam suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk perubahan yang lebih baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tentang penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter komitmen dapat disimpulkan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Kesiapan Parameter Komitmen Tahun 2014

No	SKPD	Kriteria	
		Siap	Tidak siap
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	
3	Badan Kepegawaian	√	
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat	√	
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	√	
6	Badan Perencanaan Pembangunan	√	
7	Badan Penanggulangan Bencana	√	
8	Dinas Pendapatan	√	

9	Dinas Pendidikan	√	
10	Dinas Kesehatan	√	
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
13	Dinas Perhubungan	√	
14	Dinas Pasar	√	
15	Dinas Pertanian	√	
16	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	√	
17	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	√	
18	Dinas Koperasi dan UMKM	√	
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM	√	
20	Dinas Sosial	√	
21	DPU Bina Marga	√	
22	DPU Cipta Karya	√	
23	DPU Pengairan	√	
24	Kantor Pemuda dan Olahraga	√	
25	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	√	
26	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	√	
27	Kantor Lingkungan Hidup	√	
28	Satpol PP	√	
29	Bagian Pemerintahan Umum	√	
30	Bagian Pemerintahan Desa	√	
31	Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan	√	
32	Bagian Humas	√	
33	Bagian Kesra	√	
34	Bagian Organisasi	√	
35	Bagian Umum	√	
36	Bagian Pembangunan	√	
37	Bagian Hukum	√	
38	RSD. Dr. Soebandi	√	
39	RSD. Balung	√	
40	RSD. Kalisat	√	
JUMLAH		40	0

Sumber : Hasil wawancara dengan pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten Jember.

Dari hasil tabel 4.2, dapat diketahui bahwa SKPD Pemerintah Kabupaten Jember yang menyatakan siap dalam parameter komitmen sebanyak 40 SKPD.

Tabel 4.3. Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

No	Hal yang dinilai	Rating		Jumlah Respon- den	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Kategori
		2	1				
1.	Komitmen	40	0	40	80	2	S
2.	Sumber Daya Manusia	29	11	40	69	1,73	T
3.	Sarana dan Prasarana	33	7	40	73	1,83	T
4.	Sistem Informasi	37	3	40	77	1,93	S
						1,87	

Dari hasil tabel 4.3, dapat diketahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerepan SAP berbasis akrual jika dilihat dari parameter komitmen adalah kategori siap.

b. Parameter Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter sumber daya manusia yang didukung dengan hasil wawancara dengan Kasubbag. Umum dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Didik Eko Pramono, SE.) yang mengatakan bahwa:

“Untuk penempatan pegawai keuangan disini saat ini sudah didukung oleh latar belakang yang sesuai karena SDM pelaksana sangat berperan penting dalam penerapan SAP berbasis akrual. Jika SDM pelaksananya saja tidak memahami atau tidak siap dalam menerima perubahan ini, maka sulit untuk menerapkan perubahan ini. Jadi intinya kunci utama dalam penerapan SAP berbasis akrual ini adalah kemampuan SDM pelaksana dalam menerima/ memahami makna dari perubahan itu sendiri.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mama Sudarma selaku sekretaris Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mengatakan bahwa: “Terkait dengan staff yang berkualifikasi dalam bidang keuangan, dinas kami tidak ada masalah. Dan siap untuk mengikuti dan menjalankan perubahan pedoman dasar penyusunan laporan keuangan.”

Sedangkan SKPD yang menyatakan tidak siap dalam penerapan SAP berbasis akrual disebabkan karena masih minimnya dukungan sumber daya manusia yang ada saat ini. Menurut hasil wawancara dengan Ir. Cholid Seohartono selaku staff keuangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan, mengatakan bahwa: “Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff keuangan yang berkualifikasi dalam penerapan SAP berbasis akrual, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP berbasis akrual.”

Menurut hasil wawancara dengan Moh. Basri, ST. selaku staff keuangan Badan Penanggulangan Bencana, mengatakan bahwa: “Saat ini kami masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP akrual. Dan kami berharap adanya perbaikan terkait sistem penempatan posisi pegawai yang sesuai/berkualifikasi.” Moh. Basri, ST. juga mengatakan bahwa: “Penempatan pegawai masih belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan. Hal ini karena masih ada pegawai keuangan yang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang keuangan.”

Menurut Rasyid Zakaria, S.Si. (staff keuangan DPU Pengairan) mengatakan bahwa: “kondisinya masih belum siap kalau saat ini. Tetapi kami akan melakukan perbaikan terkait dengan SDM pelaksanaannya agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam penerapannya.”

Menurut Riris Ika, S.Sos. (staff keuangan DPU Cipta Karya) mengatakan bahwa: “Untuk kondisi SDM saya rasa masih kurang siap ya. Untuk menyusun laporan yang baru ini memerlukan pemahaman yang mantap. Sedangkan SDM kami masih belum begitu mantap dalam penguasaan teorinya. Faktor budaya dari SDM juga ikut turut andil dalam menerima perubahan.”

Berdasarkan hasil wawancara tentang penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter sumber daya manusia dapat disimpulkan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Kesiapan Parameter Sumber Daya Manusia Tahun 2014

No	SKPD	Kriteria	
		Siap	Tidak Siap
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√
3	Badan Kepegawaian	√	
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat	√	
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		√
6	Badan Perencanaan Pembangunan	√	
7	Badan Penanggulangan Bencana		√
8	Dinas Pendapatan	√	
9	Dinas Pendidikan	√	
10	Dinas Kesehatan	√	
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
13	Dinas Perhubungan	√	
14	Dinas Pasar		√
15	Dinas Pertanian		√
16	Dinas Perkebunan dan Kehutanan		√
17	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	√	
18	Dinas Koperasi dan UMKM	√	
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM	√	
20	Dinas Sosial	√	
21	DPU Bina Marga	√	
22	DPU Cipta Karya		√
23	DPU Pengairan		√
24	Kantor Pemuda dan Olahraga	√	
25	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	√	
26	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		√
27	Kantor Lingkungan Hidup		√
28	Satpol PP		√
29	Bagian Pemerintahan Umum	√	
30	Bagian Pemerintahan Desa	√	
31	Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan	√	

32	Bagian Humas	√	
33	Bagian Kesra	√	
34	Bagian Organisasi	√	
35	Bagian Umum	√	
36	Bagian Pembangunan	√	
37	Bagian Hukum	√	
38	RSD. Dr. Soebandi	√	
39	RSD. Balung	√	
40	RSD. Kalisat	√	
JUMLAH		29	11

Sumber : Hasil wawancara dengan pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten Jember.

Berdasarkan tabel 4.4 tentang kesiapan SKPD Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dilihat dari parameter sumber daya manusia, SKPD yang menyatakan siap dalam penilaian parameter SDM sebanyak 29 SKPD, sedangkan SKPD yang menyatakan tidak siap dalam penilaian parameter SDM sebanyak 11 SKPD. Ketidaksiapan SKPD dalam menerapkan SAP berbasis akrual dari parameter sumber daya manusia disebabkan karena:

- 1) Bagian keuangan belum memiliki staff berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
- 2) Penempatan pegawai belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai.
- 3) Masih minimnya pemahaman sumber daya manusia pelaksana tentang SAP berbasis akrual.

Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam penerapan SAP berbasis akrual dapat menghambat pelaksanaan/penerapan secara optimal untuk mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan minimnya pemahaman tentang SAP berbasis akrual dapat berdampak pada pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada kenyataannya SAP berbasis akrual ini membutuhkan pemahaman yang kompleks agar pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang ada dalam pedoman SAP berbasis akrual. Serta budaya

menerima perubahan dari sumber daya manusia juga menjadi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual.

Tabel 4.5. Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

No	Hal yang dinilai	Rating		Jumlah Respon- den	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Kategori
		2	1				
1.	Komitmen	40	0	40	80	2	S
2.	Sumber Daya Manusia	29	11	40	69	1,73	T
3.	Sarana dan Prasarana	33	7	40	73	1,83	T
4.	Sistem Informasi	37	3	40	77	1,93	S
						1,87	

Dari hasil tabel 4.5, dapat diketahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerepan SAP berbasis akrual jika dilihat dari parameter sumber daya manusia adalah kategori tidak siap.

c. Parameter Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter sarana dan prasarana, SKPD yang menyatakan siap telah memiliki sarana dan prasarana penunjang yang baik dalam penerapan SAP berbasis akrual. Menurut hasil wawancara dengan Ucik Murbandiyah, SE. (Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan) yang mengatakan bahwa: “Di Dinas Kesehatan ini, bagian keuangan sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pembuatan laporan keuangan, termasuk untuk penerapan SAP berbasis akrual yang baru ini.”

Menurut Hariyadi Supandi, S.Sos. (staff keuangan Dinas Perhubungan) mengatakan bahwa: “Tidak ada masalahkalau untuk sarana dan prasarananya. Kami siap dalam penerapan SAP berbasis akrual.”

Menurut Supriyadi, SE. (staff keuangan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan) mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana tidak ada masalah kok. Hanya saja

sebenarnya kami berharap adanya suatu software untuk laporan keuangan. Selama ini kami masih menggunakan excel, yang intinya masih manual.”

Menurut Bobby Arie Sandy, S.STP. (Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jember) mengatakan bahwa: “Saya rasa seluruh bagian-bagian yang ada disekretariat ini tidak ada masalah soal sarana dan prasarananya. Dinas kita kan masuk dalam lingkungan sekretariat Pemkab. Jember, jadi sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi dinas-dinas yang lainnya (SKPD).”

Sedangkan SKPD yang menyatakan tidak siap dalam penerapan SAP berbasis akrual disebabkan karena sarana dan prasarana masih belum siap menghadapi perubahan pedoman SAP berbasis akrual. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Satrio Wicaksono, ST. (staff keuangan Satpol PP) yang mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana kami masih belum memfasilitasi kami untuk menyusun laporan keuangan secara maksimal. Banyak kekurangan yang masih harus segera diperbaiki.”

Menurut Drs. Dwi Hermanto (staff keuangan Kantor Lingkungan Hidup) mengatakan bahwa: “Nah, sarana dan prasarana ini juga menjadi hambatan bagi kami. Sarana dan prasarana kami masih belum bisa menunjang penerapan SAP kalau melihat dari bagaimana isi pedoman SAP itu sendiri.”

Menurut Riris Ika, S.Sos (staff keuangan DPU Cipta Karya) mengatakan bahwa: “Sarananya masih seadanya mas. Masih sangat minimsekali dan jika harus diterapkan aturan yang baru, kami rasa kami akan kesulitan untuk menyesuaikan dengan pedoman yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara tentang penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter sarana dan prasarana dapat disimpulkan dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Kesiapan Parameter Sarana dan Prasarana Tahun 2014

No	SKPD	Kriteria	
		Siap	Tidak Siap
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	
3	Badan Kepegawaian	√	
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat	√	
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	√	
6	Badan Perencanaan Pembangunan	√	
7	Badan Penanggulangan Bencana		√
8	Dinas Pendapatan	√	
9	Dinas Pendidikan	√	
10	Dinas Kesehatan	√	
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
13	Dinas Perhubungan	√	
14	Dinas Pasar		√
15	Dinas Pertanian		√
16	Dinas Perkebunan dan Kehutanan		√
17	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	√	
18	Dinas Koperasi dan UMKM	√	
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM	√	
20	Dinas Sosial	√	
21	DPU Bina Marga	√	
22	DPU Cipta Karya		√
23	DPU Pengairan	√	
24	Kantor Pemuda dan Olahraga	√	
25	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	√	
26	Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	√	
27	Kantor Lingkungan Hidup		√
28	Satpol PP		√

29	Bagian Pemerintahan Umum	√	
30	Bagian Pemerintahan Desa	√	
31	Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan	√	
32	Bagian Humas	√	
33	Bagian Kesra	√	
34	Bagian Organisasi	√	
35	Bagian Umum	√	
36	Bagian Pembangunan	√	
37	Bagian Hukum	√	
38	RSD. Dr. Soebandi	√	
39	RSD. Balung	√	
40	RSD. Kalisat	√	
JUMLAH		33	7

Sumber : Hasil wawancara dengan pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten Jember.

Berdasarkan tabel 4.6 tentang kesiapan SKPD Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual jika dilihat dari parameter sarana dan prasarana, SKPD yang menyatakan siap dalam penilaian parameter sarana dan prasarana sebanyak 33 SKPD, sedangkan SKPD yang menyatakan tidak siap dalam penilaian parameter sarana dan prasarana sebanyak 7 SKPD. Ketidaksiapan SKPD dalam menerapkan SAP berbasis akrual disebabkan karena:

- 1) Bagian Keuangan belum memiliki sarana komputer yang cukup dalam pelaksanaan tugas menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.
- 2) Belum adanya dukungan yang baik dari sistem informasi yang terintegrasi dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.
- 3) Pengolahan data transaksi masih dilakukan dengan cara manual.

Tabel 4.7 Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

No	Hal yang dinilai	Rating		Jumlah Respon- den	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Kategori
		2	1				
1.	Komitmen	40	0	40	80	2	S
2.	Sumber Daya Manusia	29	11	40	69	1,73	T
3.	Sarana dan Prasarana	33	7	40	73	1,83	T
4.	Sistem Informasi	37	3	40	77	1,93	S
						1,87	

Dari hasil tabel 4.7, dapat diketahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerepan SAP berbasis akrua jika dilihat dari parameter sarana dan prasaran adalah kategori tidak siap.

d. Parameter Sistem Informasi

Berdasarkan hasil wawancara tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrua dari parameter sistem informasi, SKPD yang dikategorikan siap dalam penerapan SAP berbasis akrua telah memiliki sistem informasi yang baik. Menurut Dra. Lilis Muryani (staff keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) mengatakan bahwa: “Sistem informasi tidak ada masalah kok. Saya rasa sudah siap memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aturan yang baru.”

Menurut Dodi Eriyanto, SE. (Kasubbag. Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan) mengatakan bahwa: “Sistem informasi yang ada saat ini sudah memberikan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrua.”

Menurut Ribut Herlambang Widjajanto, SE. (Kasubbag. Akuntansi dan Keuangan RSD. Dr. Soebandi) mengatakan bahwa: “Kami selalu mengutamakan sistem informasi yang dibutuhkan, karena itu semua terkait dengan kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kami ke pusat.”

Sedangkan SKPD yang menyatakan tidak siap dalam penerapan SAP berbasis akrual disebabkan karena masih belum adanya dukungan yang baik dari sistem informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam laporan keuangan daerah. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Moh. Basri, ST. (staff keuangan Badan Penanggulangan Bencana) mengatakan bahwa: “Kesiapan sistem informasi juga menjadi sorotan menjadi sorotan di dinas ini mas. Minimnya dukungan sistem informasi manajemen itu sendiri yang membuat kami kesulitan jika melihat pedoman yang begitu rumit dan kompleks.”

Menurut Satrio Wicaksono, ST. (staff keuangan Satpol PP) yang mengatakan bahwa: “Kami juga kebingungan untuk sistem informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual.” Sedangkan menurut Riris Ika, S.Sos. (staff keuangan DPU Cipta Karya) mengatakan bahwa: “Sistem informasinya juga masih belum bagus mas. Masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010.”

Berdasarkan hasil wawancara tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual dari parameter sistem informasi dapat disimpulkan dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Kesiapan dari Parameter Sistem Informasi Tahun 2014

No	SKPD	Kriteria	
		Siap	Tidak Siap
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	
3	Badan Kepegawaian	√	
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat	√	
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	√	
6	Badan Perencanaan Pembangunan	√	
7	Badan Penanggulangan Bencana		√
8	Dinas Pendapatan	√	
9	Dinas Pendidikan	√	
10	Dinas Kesehatan	√	

11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	√	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	
13	Dinas Perhubungan	√	
14	Dinas Pasar	√	
15	Dinas Pertanian	√	
16	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	√	
17	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	√	
18	Dinas Koperasi dan UMKM	√	
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM	√	
20	Dinas Sosial	√	
21	DPU Bina Marga	√	
22	DPU Cipta Karya		√
23	DPU Pengairan	√	
24	Kantor Pemuda dan Olahraga	√	
25	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	√	
26	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	√	
27	Kantor Lingkungan Hidup	√	
28	Satpol PP		√
29	Bagian Pemerintahan Umum	√	
30	Bagian Pemerintahan Desa	√	
31	Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan	√	
32	Bagian Humas	√	
33	Bagian Kesra	√	
34	Bagian Organisasi	√	
35	Bagian Umum	√	
36	Bagian Pembangunan	√	
37	Bagian Hukum	√	
38	RSD. Dr. Soebandi	√	
39	RSD. Balung	√	
40	RSD. Kalisat	√	
JUMLAH		37	3

Sumber : Hasil wawancara dengan pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten Jember.

Berdasarkan tabel 4.8, tentang kesiapan SKPD Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual jika dilihat dari parameter sistem informasi, SKPD yang menyatakan siap dalam penilaian parameter sistem informasi sebanyak 37 SKPD, sedangkan SKPD yang menyatakan tidak siap dalam penilaian parameter sistem informasi sebanyak 3 SKPD.

Ketidaksiapan SKPD dalam penerapan SAP berbasis akrual berdasarkan parameter sistem informasi disebabkan oleh kurangnya dukungan sistem informasi manajemen yang mengakomodir pelaksanaan/penerapan SAP berbasis akrual, serta minimnya pemahaman tentang kebijakan dan prosedur akuntansi SAP Berbasis Akrual. Hal ini dapat berpengaruh pada informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.9. Kondisi Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

No	Hal yang dinilai	Rating		Jumlah Respon- den	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Kategori
		2	1				
1.	Komitmen	40	0	40	80	2	S
2.	Sumber Daya Manusia	29	11	40	69	1,73	T
3.	Sarana dan Prasarana	33	7	40	73	1,83	T
4.	Sistem Informasi	37	3	40	77	1,93	S
						1,87	

Dari hasil tabel 4.9, dapat diketahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerepan SAP berbasis akrual jika dilihat dari parameter sistem informasi adalah kategori siap.

4.1.3 Analisis Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan SAP berbasis akrual masih memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi meliputi masalah sumber daya manusia

pelaksananya, sarana dan prasarana, dan sistem informasi yang menunjang penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Didik Eko Pramono, SE. (Kasubbag. Umum dan Keuangan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang mengatakan bahwa: “Kendala yang dihadapi saat ini, yaitu terkait SDM pelaksana dalam menerima perubahan. Biasanya banyak SDM pelaksana yang kesulitan untuk menerima perubahan untuk di implementasikan secara langsung”.

Menurut Supriyadi, SE. (staff keuangan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan) mengatakan bahwa: “Kendala yang dihadapi rata-rata sama antar dinas, yaitu terkait dengan budaya menerima perubahan. Maklum lah biasanya di Indonesia ini kan rakyatnya selalu kaget dengan namanya perubahan dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri”.

Menurut Luluk Fatmawati, SE. (staff keuangan Dinas Pendapatan) mengatakan bahwa: “Kendala yang dihadapi biasanya dari SDM yang belum begitu paham tentang SAP yang baru dan penyesuaian dalam menerima perubahan, serta sarana penunjang yang kadang kurang mendukung pelaksanaan perubahansistem mekanisme”.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual adalah sebagai berikut:

- a. Bagian keuangan belum memiliki staff berkualifikasi dalam jumlah yang cukup. (Yang meliputi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, DPU Cipta Karya, DPU Pengairan, Kantor Perpustakaan, Kantor Lingkungan Hidup, dan Satpol PP)
- b. Penempatan pegawai bagian keuangan belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. (Yang meliputi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan

- Kehutanan, DPU Cipta Karya, DPU Pengairan, Kantor Perpustakaan, Kantor Lingkungan Hidup, dan Satpol PP)
- c. Minimnya pemahaman PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. (Yang meliputi: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, DPU Cipta Karya, DPU Pengairan, Kantor Perpustakaan, Kantor Lingkungan Hidup, dan Satpol PP)
 - d. Bagian keuangan belum memiliki sarana yang cukup memadai dalam penerapan SAP Berbasis Akrual. (Yang meliputi: Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, DPU Cipta Karya, Kantor Lingkungan Hidup, dan Satpol PP)
 - e. Pengolahan data transaksi keuangan masih dilakukan secara manual (excel). (Yang meliputi: Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pasar, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, DPU Cipta Karya, Kantor Lingkungan Hidup, dan Satpol PP)
 - f. Kebijakan dan prosedur akuntansi SAP berbasis akrual belum dipahami oleh seluruh pegawai keuangan. (Yang meliputi: Badan Penanggulangan Bencana, DPU Cipta Karya dan Satpol PP)

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Jember yang terkait dengan pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah Kemendagri bekerjasama dengan KSAP perlu rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan penerapan basis akrual. Kondisi di daerah khususnya di Kabupaten Jember saat ini adalah kurangnya pemahaman terkait PP tersebut, sehingga sosialisasi dan bimbingan teknis sangat diperlukan. Serta perlu dilakukan perbaikan untuk sarana prasarana dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penerapan SAP berbasis akrual.

4.2 Pembahasan

Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dengan melihat parameter Komitmen dikategorikan siap, SDM dikategorikan tidak siap, Sarana dan Prasarana dikategorikan tidak siap, serta Sistem Informasi dikategorikan siap.

Penilaian kesiapan jika dilihat dari parameter komitmen secara keseluruhan menyatakan sangat siap dari masing-masing SKPD. Hal ini dijelaskan pada hasil penelitian yang menunjukkan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan siap dalam penerapan SAP berbasis akrual berdasarkan pada parameter komitmen. Menurut hasil wawancara dengan Didik Eko Pramono, SE. (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan) pada tanggal 10 September 2014, mengatakan:

“Komitmen itu sangat penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan faktor yang akan menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Jember.”

Penilaian kesiapan dari parameter sumber daya manusia yang ditekankan pada pegawai keuangan yang akan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dilandasi beberapa pengetahuan dan keahlian tentang akuntansi yang akan mendukung keberhasilan penerapan melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Pentingnya sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan dijelaskan dengan hasil wawancara Kasubag Keuangan dan Akuntansi RSD. Dr. Soebandi Jember, Ribut Herlambang Widjanto, SE. Pada tanggal 10 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual harus memperhatikan semua orang yang

terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai keuangan yang akan mengerjakannya, dan seharusnya pegawai keuangan yang mengerjakannya adalah pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai keuangan didukung dengan kesiapan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP nantinya.”

Akan tetapi pada kenyataannya dalam masing-masing SKPD masih banyak pegawai di bagian keuangan yang berpendidikan non akuntansi sehingga dapat menghambat pelaksanaan/penerapan SAP berbasis akrual secara maksimal. Pada kenyataannya masih ada 11 SKPD yang menyatakan tidak siap dalam pelaksanaan/penerapan SAP berbasis akrual yang dilihat dari parameter SDM dengan berbagai kendala yang dihadapi. Kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman pegawai keuangan tentang SAP berbasis akrual yang disebabkan karena masih banyak pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Jember (SKPD) harus segera melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada saat ini. Penerapan SAP berbasis akrual yang harus dilakukan secara penuh pada tahun 2015, harus diimbangi dengan pemahaman SDM yang baik tentang SAP berbasis akrual. Jika tidak segera melakukan perbaikan kualitas SDM yang ada, Pemerintah Kabupaten Jember akan kesulitan untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban.

Sedangkan kesiapan sarana dan prasarana serta sistem informasi dalam penerapan SAP juga tidak kalah pentingnya mengingat parameter kesiapan sarana dan sistem informasi berkaitan dengan pelaksanaannya penerapan SAP nantinya. Sarana prasarana dan sistem informasi juga menjadi sorotan utama dalam persiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Jember. Masih minimnya dukungan sarana penunjang penerapan SAP berbasis akrual ini, harus dapat segera diatasi dengan perbaikan dan pengembangan yang baik untuk menghasilkan optimalisasi penerapan SAP berbasis akrual secara penuh dan baik. Sarana prasarana sangat berperan penting dalam penerapan SAP berbasis akrual, dibutuhkan sarana

yang lebih baik untuk penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban berdasarkan SAP berbasis akrual.

Pentingnya sarana dan prasarana penunjang serta sistem informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual dijelaskan dengan hasil wawancara dengan Bapak Pitoyo, SKM., Kepala Bagian Keuangan RSD. Balung Kabupaten Jember pada tanggal 12 November 2014 yang menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh dibutuhkan sarana prasarana dan sistem informasi yang lebih baik dan dapat menunjang segala aktivitas atas pelaksanaan SAP berbasis akrual. Melihat kondisi yang ada saat ini, masih banyak sarana dan prasarana yang harus diperbaiki atau dikembangkan untuk penerapan SAP berbasis akrual. Tanpa adanya dukungan dari sarana prasarana dan sistem informasi yang baik, pelaksanaan SAP berbasis akrual tidak dapat berjalan secara optimal.”

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesiapan dalam penerapan SAP, dalam rangka kesiapan implementasi SAP berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tersebut, masih terdapat beberapa kendala. Adanya kelemahan atau kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka kesiapan implementasi SAP berbasis akrual secara penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, maka Kabupaten Jember perlu lebih fokus dan optimal dalam mengatasi kendala yang ada. Dengan kata lain, adalah peningkatan komitmen, kemauan dan integritas Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus melakukan pengembangan dan sosialisasi tentang pemahaman SAP berbasis akrual serta memperbaiki sarana prasarana dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan segala aktivitas atas pelaksanaan SAP dalam upaya mendukung optimalisasi bidang tugas pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Didik Eko Pramono, SE. (Kasubag Umum dan Keuangan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan) Kabupaten Jember pada tanggal 10 September 2014 menyatakan:

“Penerapan SAP ini di Pemerintah Kabupaten Jember tidak sepenuhnya mudah untuk diterapkan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal. Banyak sekali kendala dan hambatan yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan seperti masalah SDM, sistemnya dan hambatan lain yang masih ada untuk menerapkan SAP berbasis akrual ini.”

Hasil yang ada sehubungan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Jember belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) karena masih menunggu pedoman umum yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri, namun pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk melaksanakan dan memanfaatkan SAP dalam pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk transparansi tugas menuju good governance.
- b. Sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, yang dijadikan pedoman dalam proses penyusunan LKPD adalah PP No. 24 Tahun 2005 yang sifatnya sementara.
- c. Jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, masih sebagian kecil saja yang memahami teknis SAP, dan secara kualitas mungkin masih sangat perlu ditingkatkan karena pada umumnya pemahaman pegawai mengenai akuntansi pemerintahan masih lemah dan pemahaman tentang penerapan basis akrual masih kurang.
- d. Belum dibangunnya software untuk mengakomodir ketentuan PP No. 71 Tahun 2010.
- e. Sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi terutama dimasing-masing SKPD, seperti perangkat lunak untuk menyusun laporan pertanggungjawaban.
- f. Pemerintah daerah kurang memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP

Pemerintah Kabupaten Jember terkait dengan pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah Kemendagri bekerjasama dengan

KSAP perlu rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan penerapan basis akrual. Kondisi di daerah khususnya di Kabupaten Jember saat ini adalah kurangnya pemahaman terkait PP tersebut, sehingga sosialisasi dan bimbingan teknis sangat diperlukan.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, LKPD Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2014 ini masih berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Jember sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan PP No.71 Tahun 2010 yang akan dimulai pada tahun 2015 dengan meningkatkan pemahaman melalui keikutsertaan dalam sosialisasi PP tersebut, meskipun nara sumber berasal dari akademisi.

Selanjutnya, untuk mengatasi kendala terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam bidang akuntansi, Pemerintah Kabupaten Jember berusaha mengikutsertakan SDM untuk mengikuti kursus akuntansi. Sedangkan untuk permasalahan pada sarana prasarana dan sistem informasi, Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan perbaikan dalam hal kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan sistem informasi penunjang agar dapat menjalankan/menerapkan SAP berbasis akrual yang optimal dan dapat menyusun laporan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dilihat dari parameter komitmen adalah kategori siap, dari parameter SDM adalah kategori tidak siap, dari parameter sarana dan prasarana adalah kategori tidak siap, dan dari parameter sistem informasi adalah kategori siap.
- b. Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, bagian keuangan belum memiliki staff berkualifikasi dalam jumlah yang cukup, penempatan pegawai bagian keuangan belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, minimnya pemahaman PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, bagian keuangan belum memiliki sarana yang cukup memadai dalam penerapan SAP Berbasis Akrual, pengolahan data transaksi keuangan masih dilakukan secara manual (excel), kebijakan dan prosedur akuntansi SAP berbasis akrual belum dipahami oleh seluruh pegawai keuangan.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

- a. Penilaian kesiapan pegawai keuangan dalam penerapan SAP berbasis akrual masih menggunakan persepsi dari pegawai keuangan, tidak dinilai secara langsung dari hasil pelaksanaannya.
- b. Penelitian ini hanya mendeskripsikan tetapi tidak menjelaskan pengaruh dari masing-masing parameter terhadap kesiapan.

- c. Wawancara dalam penelitian ini belum sepenuhnya dikembangkan terkait dengan indikator pada parameter yang digunakan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diajukan beberapa saran antara lain:

- a. Untuk peneliti selanjutnya, penilaian kesiapan penerapan SAP berbasis akual tidak hanya diukur dari persepsi penilaian pegawai terhadap parameter tetapi juga didukung hasil implementasi atau evaluasi pelaksanaan secara riil tentang pelaksanaan SAP.
- b. Hendaknya diuji pengaruh parameter terhadap kesiapan SAP sehingga mampu melihat besar kontribusinya.
- c. Pengembangan wawancara untuk mengupas indikator-indikator yang terdapat pada parameter kesiapan dalam pelaksanaan SAP berbasis akual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, Citra. 2011. *Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Pemerintah Kota Binjai*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan* <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Diakses tanggal 12 September 2012.
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. *Infrastructure System Management & Optimization. Internasional Seminar "Paradigm & Strategy of Infrastructure Management"* Civil Engineering Departement Diponegoro University.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartanto, Jogyanto. 2002. *Pengenalan Komputer*. Andi. Yogyakarta.
- Hasibuan, SP. Malayu. 2002. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses tanggal 9 Januari 2014.
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Februari.
- Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muchtar, AM. 2002. *Audit Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Edisi I. Andi Offset. Yogyakarta
- Mulyana, Budi, penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara Lain; Tren di Negara-Negara Anggota OECD
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri. 2012. *Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi SAP berbasis Akrual secara Penuh berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Robert J. Kodoatie, 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Jakarta: PT. Erlangga
- Simanjuntak, Binsar. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi III*. Jakarta: Indonesia , Salemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulani, Aldiani. 2010. *Faktor–Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2012, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*, Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No 89 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. : Kepala SKPD Pemkab. Jember
Di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1694/314/2014

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember

Memperhatikan : Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 1 September 2014 Nomor 1557/UN25.3.1/LT.5/2014 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Andul Fatah Cahya Purnama 100810301100
Instansi/Fak. : Akuntansi / Ekonomi / Universitas Jember
Alamat : Perum Muktisari P-14 Jember
Keperluan : Melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)"
Lokasi : SKPD Pemerintah Kabupaten Jember (Terlampir)
Tanggal : 03-09-2014 s/d 03-12-2014

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan:

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 03-09-2014

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris



Drs. MOH. HASYIM, M.Si.
Pembina Tingkat I
195902131982111001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No 89 ☎ 337853 Jember

Lampiran Surat Nomor : 072/1694/314/2014

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1	Bapemas Pemerintah Kabupaten Jember
2	Bappekab dan PM Pemerintah Kabupaten Jember
3	Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Jember
4	Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Jember
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jember
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jember
7	Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Jember
8	Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember
9	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jember
10	Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jember
11	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Jember
12	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Jember
13	DPU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Jember
14	DPU Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Jember
15	DPU Pengairan Pemerintah Kabupaten Jember
16	Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Jember
17	Disperindag dan ESDM Pemerintah Kabupaten Jember
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jember
19	Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember
20	Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jember
22	Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Jember
23	Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Jember
24	Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember
25	Kantor Pariwisata Pemerintah Kabupaten Jember
26	Kantor Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Jember
27	Kantor Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Jember
28	Satpol PP Pemerintah Kabupaten Jember
29	Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah Kabupaten Jember
30	Bagian Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Jember
31	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember
32	Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Jember
33	Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Jember
34	Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember
35	Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember
36	Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Jember
37	Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Jember
38	RSD Dr Soebandi Pemerintah Kabupaten Jember
39	RSD Kalisat Pemerintah Kabupaten Jember
40	RSD Balung Pemerintah Kabupaten Jember

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?
2. Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akrual?
3. Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akrual?
4. Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akrual?
5. Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akrual?
6. Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
7. Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
8. Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
9. Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
10. Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?

MANUSKRIP

- Responden Waktu wawancara : Didik Eko Pramono, SE.
: Rabu, 10 September 2014
Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Oh silakan dek!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah kok dek, kami sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
- Peneliti : Apakah SKPD di Pemkab. Jember sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk saat ini Pemkab. Jember belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 itu, soalnya belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang itu semua. Kita nunggu keluarnya peraturan daerah tentang penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Komitmen itu sangat penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI secara penuh pada tahun 2015 berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan faktor yang akan menjadi landasan kuat untuk keberhasilan penerapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaI secara penuh berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Pemerintah Kabupaten Jember.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini saya rasa dinas kami sudah memiliki staff yang berkualifikasi untuk penerapan SAP berbasis akruaI.

- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Untuk penempatan pegawai keuangan disini saat ini sudah didukung oleh latar pendidikan yang sesuai.
SDM pelaksana sangat berperan penting dalam penerapan SAP berbasis akrual ini. Jika SDM pelaksananya saja tidak memahami atau tidak siap dalam menerima perubahan ini, maka sulit untuk menerapkan perubahan yang ada seperti saat ini. Jadi intinya kunci utama dalam penerapan SAP Berbasis Akrual ini adalah kemampuan SDM pelaksana dalam menerima/memahami makna perubahan itu sendiri.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemkab. Jember sejauh ini sudah melakukan pelatihan dalam kesiapan untuk penerapan SAP Berbasis Akrual.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana yang ada disini sudah cukup memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015 nanti.
- Peneliti : Bagaimana kondisi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kondisi sarananya cukup siap untuk penerapan SAP Berbasis Akrual, tetapi masih perlu dilakukan perkembangan agar lebih baik lagi ke depannya.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Saat ini saya rasa untuk sistem informasi tidak ada masalah kok.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Itu sudah jadi kewajiban untuk mensosialisasikan segala sesuatu terkait perubahan/peraturan baru termasuk kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi saat ini, yaitu terkait SDM pelaksana dalam menerima perubahan. Biasanya banyak SDM pelaksana yang kesulitan untuk menerima perubahan untuk di implementasikan secara langsung.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Nurul Maulida, SE.
Waktu :
Wawancara : Rabu, 10 September 2014
Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Silahkan mas!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Belum, kita tunggu peraturan daerah tentang pedoman penyusunan laporan keuangan daerah.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang penggunaan SAP berbasis akruaI sebagai pedoman dasar penyusunan laporan keuangan daerah.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Belum, masih ada pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan.
- Peneliti : Jadi, bagaimana kondisi kesiapan dari SDM itu sendiri dalam

- penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Untuk kondisi SDM sebenarnya kami masih belum siap, itu disebabkan karena bagian keuangan kami masih belum memiliki kualifikasi dalam jumlah yang cukup sehingga tingkat pemahaman dari SAP akrual ini masih kurang.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sudah, selama ini sudah ada dilakukan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual, akan tetapi itu hanya sebatas gambaran saja, belum ada contoh kongkrit bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan nanti.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana saya rasa sudah ok dan siap untuk penerapan SAP berbasis akrual
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi yang terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrual juga sudah baik.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Kami selalu mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh pegawai keuangan terkait SAP Berbasis Akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi di dinas kami yaitu masalah staff atau SDM pelaksana yang berkualifikasi belum cukup sehingga menghambat kesiapan dari faktor SDM itu sendiri. Selain itu, pemahaman terkait SAP Berbasis Akrual juga menjadi kendala yang harus segera diatasi.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Dian Nilawati, SE.
Waktu wawancara : Rabu, 10 September 2014
Instansi : Badan Kepegawaian
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya, silahkan!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Selain dari pelatihan itu, kami dapat info dari internet mas.
- Peneliti : Apakah dinas-dinas Pemkab. Jember sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akrual?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual masih belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah terkait peraturan tersebut.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Secara komitmen kami selalu siap melakukan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual pada tahun 2015.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Bagian keuangan telah memiliki staff yang berkualifikasi dan siap untuk melaksanakan penerapan SAP Berbasis AkruaI sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Untuk pegawai keuangan sudah didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, meskipun ada beberapa yang berlatar

- belakang pendidikan yang belum sesuai dan harapan kedepannya bisa diperbaiki.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan tentang SAP berbasis akrual sudah dilakukan secara berkesinambungan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Untuk sarana dan prasarana pendukungnya sudah kami persiapkan untuk penerapan SAP berbasis akrual sehingga pada saat diterapkan SAP yang baru nanti mulai diterapkan, kami sudah siap.
- Peneliti : Bagaimana kondisi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kondisinya saat ini cukup bagus, tetapi perlu adanya sedikit perbaikan/pengembangan agar dapat memfasilitasi kebutuhan pembuatan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Untuk saat ini sistem informasi yang ada kami rasa cukup siap.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Seluruh kebijakan selalu disosialisasikan kepada pegawai yang ada disini, termasuk kebijakan terkait prosedur SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi biasanya dari SDM dan Sarananya. Ini kan dinas dibawah naungan Pemkab. Jember, jadi segala putusan menjadi wewenang pihak petinggi Pemkab. Jember itu sendiri. Termasuk masalah rotasi jabatan yang sering dilakukan. Rotasi dilakukan tidak melihat dari latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan sehingga sering kali menghambat suatu aturan yang ditetapkan di bagian tersebut.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Danuk Kristiyana, SE.
Waktu wawancara : Kamis, 11 September 2014
Instansi : Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada tahun 2015.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff di bagian keuangan saya rasa sudah berkualifikasi dengan jumlah yang cukup, sehingga siap untuk penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk penempatan pegawai belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, akan tetapi kami beserta staff keuangan lainnya selalu siap untuk menerapkan perubahan yang lebih baik dalam penerapan SAP berbasis akruaI

- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan SAP berbasis akrual sudah sering dilakukan oleh pemerintah sejak dikeluarkan PP yang baru ini. Hanya saja masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana implementasi yang sebenarnya di lapangan nanti.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana di bagian keuangan masih tetap menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Dan saya rasa itu cukup dan layak untuk penerapan SAP akrual.
- Peneliti : Bagaimana kondisi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kondisinya cukup baik kok dek. Masih mendukung untuk pelaksanaan pembuatan laporan keuangan sesuai SAP yang baru.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasinya saya rasa juga siap kok terkait pelaksanaan penerapan SAP yang baru.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Itu pasti lah. Setiap kebijakan selalu di sosialisasikan dulu, apalagi ini kan kebijakan baru yang wajib dipahami semua pegawai yang ada disini khususnya pegawai keuangan terkait kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual ini.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari masing-masing SDM yang berbeda-beda ya. Kan gak semua SDM pelaksana paham seluruhnya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Dra. Lilis Muryani
Waktu wawancara : Senin, 3 November 2014
Instansi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari internet dan teman-teman dinas lain.
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akruaI belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada tahun 2015.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Itu dia masalahnya mas. Banyak pegawai di bagian keuangan yang berlatar belakang pendidikan yang belum sesuai dengan tugasnya, sehingga kesulitan dalam pemahaman SAP yang baru

- secara cepat dan cermat.
- Peneliti : Jadi, bagaimana kondisi kesiapan dari SDM itu sendiri dalam penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kondisi SDM dalam penerapan SAP berbasis akrual masih menjadi masalah atau kendala yang serius bagi kami. Kurangnya pegawai yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup serta kurangnya peran dari organisasi dalam pengembangan keahlian yang menenggarai kami masih belum siap dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh, sehingga pemahaman SDM tentang SAP berbasis akrual masih lemah dan perlu adanya pengembangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sudah beberapa kali diadakan pelatihan/sosialisasi terkait SAP yang baru ini. Hanya saja kendala yang dihadapi saat ini soal pemahaman menerima perubahan tersebut.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana sepertinya siap untuk pelaksanaan SAP yang baru ini. Kami disini masih memanfaatkan sarana yang ada, sambil menunggu perkembangan setelah implementasinya.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi juga tidak ada masalah kok. Saya rasa sudah siap memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aturan yang baru.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Semua kebijakan selalu disosialisasikan dulu ke semua pegawai sebelum diterapkan.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi, yaitu masalah SDM yang masih belum begitu paham apa dan bagaimana sebenarnya SAP berbasis akrual di lapangan nanti. Saya rasa itu akan jadi batu sandungan pada saat awal penerapan secara penuh.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Dodi Eriyanto, SE.
Waktu wawancara : Jum'at, 7 November 2014
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada tahun 2015 nanti.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk penempatan pegawai saat ini sudah didukung oleh latar belakang yang sesuai dengan bidangnya, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukannya rotasi sehingga dapat merubah

- semuanya.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah telah melakukan sosialisasi/pelatihan tentang ini secara berkesinambungan. Ini menunjukkan pemerintah benar-benar ingin perubahan ini berjalan sesuai harapan.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Bagian keuangan sudah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai, dan siap untuk pelaksanaan penerapan SAP akrual pada saat yang telah ditetapkan.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi yang ada saat ini sudah memberikan dukungan yang baik terhadap pelaksanaan penerapan SAP akrual ini.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Itu pasti. Semua kebijakan dan prosedur SAP akrual harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai, khususnya pegawai keuangan soal PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang sering dihadapi adanya rotasi jabatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi, dapat menghambat kesiapan dalam penerapan SAP akrual ini.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Moh. Basri, ST.
Waktu wawancara : Selasa, 11 November 2014
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Silahkan mas.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu keluarnya Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini kami masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP akruaI. Dan kami berharap adanya perbaikan terkait sistem penempatan posisi pegawai yang sesuai/berkualifikasi.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Penempatan pegawai masih belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan. Hal ini karena masih ada pegawai keuangan yang pendidikannya tidak sesuai

- dengan bidang keuangan.
- Peneliti : Jadi, bagaimana kondisi kesiapan dari SDM itu sendiri dalam penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kondisi kesiapan SDM dalam menerapkan SAP berbasis akrual menjadi sorotan utama, masalahnya itu pemahaman dari pelaksana masih kebingungan dan belum mengerti makna dari implementasi SAP berbasis akrual. Petugas pelaksanaannya masih kerap membandingkan SAP yang baru ini dengan SAP yang lama.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sosialisasi/pelatihan sudah berulang kali mas. Tapi kan masih banyak pegawai yang masih belum begitu paham proses dilapangannya nanti seperti apa.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum memadai kalau kita lihat dari teori/pedoman tentang penyusunan laporan keuangan sesuai SAP yang baru.
- Peneliti : Maksudnya itu bagaimana?
- Responden : Begini mas, dalam laporan keuangan yang baru ini tugas kita menjadi lebih banyak. Dari yang awalnya kami cuma membuat 4 laporan, sekarang dengan aturan yang baru kami harus membuat 7 komponen laporan. Nah, dari situlah kami beranggapan kalau sarana yang ada saat ini belum memadai untuk itu semua.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kesiapan sistem informasi juga menjadi sorotan di dinas ini mas. Minimnya dukungan sistem informasi manajemen itu sendiri membuat kami kesulitan jika melihat pedomannya yang begitu rumit dan kompleks.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Kami selalu berusaha mensosialisasikan kebijakan-kebijakan sesuai prosedur yang ada, termasuk kebijakan soal SAP berbasis akrual ini.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi di dinas kami yaitu masalah staff atau SDM pelaksana yang berkualifikasi belum cukup sehingga menghambat kesiapan dari faktor SDM itu sendiri. Selain itu, pemahaman terkait SAP Berbasis Akrual juga menjadi kendala

yang harus diatasi secepatnya. Sarana prasarana penunjang dan sistem informasi yang kurang mendukung menjadi sorotan dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
Responden : Iya, sama-sama.



MANUSKRIP

- Responden : Luluk Fatmawati, SE.
Waktu wawancara : Kamis, 11 September 2014
Instansi : Dinas Pendapatan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Oh iya, silahkan mas!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Kami beserta pegawai keuangan disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan di lingkungan Pemkab. Jember, kami masih menunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI pada waktu yang telah ditetapkan.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff/pegawai kami dibagian keuangan sudah sesuai dengan kualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk pelaksanaan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Penempatan pegawai di bagian keuangan sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan, sehingga sangat mendukung untuk pelaksanaan penerapan SAP

MANUSKRIP

- Responden : Drs. Kusni, MM.
Waktu wawancara : Selasa, 4 November 2014
Instansi : Dinas Pendidikan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff/pegawai keuangan kami sudah berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan siap untuk penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Penempatan pegawai sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dijabat.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akruaI

- secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah sudah melakukan pelatihan/sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana kami sudah dipersiapkan untuk perubahan pedoman penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang baru.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi juga sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan dari pedoman penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Seluruh pegawai selalu menerima sosialisasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan baik yang baru maupun yang sudah lama.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari masing-masing SDM yang berbeda-beda ya. Tidak semua SDM paham dan mengerti tentang perubahan pedoman penyusunan laporan keuangan ini.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Ucik Murbandiyah, SE.
Waktu wawancara : Selasa, 4 November 2014
Instansi : Dinas Kesehatan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Oh iya mas!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Saya beserta jajaran staff keuangan sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 tentang pedoman SAP yang baru (SAP berbasis akruaI).
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kami masih menunggu aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait penerapan dari PP No. 71 Tahun 2010.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen kami siap melakukan apapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk penerapan PP No. 71 tahun 2010.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff keuangan kami, saya rasa sudah berkualifikasi untuk penerepan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru ini.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Kalau untuk penempatan pegawai belum didukung oleh latar belakang yang sesuai dengan bidang keuangan. Tetapi hal tersebut tidak masalah karena staff kami sudah berpengalaman dalam bidang keuangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP

- Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan pelatihan/ sosialisasi PP Nomer 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual beberapa kali, untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Di dinas kesehatan ini, bagian keuangan sudah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pembuatan laporan keuangan, termasuk untuk penerapan SAP akrual yang baru ini.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi yang kami miliki saat ini sudah terintegrasi untuk pembuatan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Kebijakan dan prosedur tentang SAP berbasis akrual sudah kami sosialisasikan kepada seluruh pegawai (pegawai keuangan).
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang mungkin dihadapi yaitu: masalah yang berhubungan dengan pemahaman dalam menerima perubahan, dalam PP yang baru ini kan tata cara penyusunan laporan keuangannya sangat berbeda dan lebih rumit.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Drs. Sudarsono, M.Si.
Waktu wawancara : Selasa, 11 November 2014
Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Ok.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang sering dilakukan pemerintah.
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Kami selaku SKPD selalu berkomitmen menjunjung tinggi azas visi dan misi setiap perubahan yang dilakukan pemerintah termasuk menjunjung azas visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Keadaan staff keuangan kami sudah cukup dalam hal kualifikasi untuk penerapan SAP berbasis akruaI seperti yang tercantum dalam PP No.71 Tahun 2010.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Kondisi yang ada saat ini pegawai keuangan sudah didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, meskipun menutup kemungkinan untuk rotasi posisi dari setiap pegawai itu sendiri.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP

- Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah sudah mengadakan pelatihan/sosialisasi tentang PP 71 Tahun 2010 yang bertujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP Berbasis Akrual secara berkesinambungan.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana penunjangnya sudah cukup memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual. Hanya saja perlu dilakukan perbaikan/peremajaan agar nantinya tidak menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kalau untuk kesiapan sistem informasi yang terkait dengan pelaksanaan SAP berbasis akrual, kita sesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Setiap periode tertentu kami selalu melakukan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan/kebijakan baru salah satunya kebijakan tentang SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendalanya biasanya ada pada sarana dan prasarana penunjangnya, yang kadang terjadi kesalahan teknis dalam penyusunan laporan keuangan.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Ir. Sri Wahyuni
Waktu wawancara : Selasa, 11 November 2014
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya, silahkan!
Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Bagian keuangan sudah memiliki petugas yang berkualifikasi dalam jumlah yang saya pikir sudah cukup dalam penerapan SAP yang baru.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Ada beberapa pegawai yang pendidikan belum sesuai dengan bidang keuangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang

- berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah berkali-kali meminta pegawai keuangan kami untuk mengikuti pelatihan/sosialisasi yang bertujuan menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP Berbasis Akrual secara berkesinambungan.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarananya saat ini bisa dikategorikan fifty-fifty (antara siap dan tidak siap). Hal tersebut karena kami masih belum begitu paham bagaimana mekanisme di lapangan nantinya.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Saya pikir sama halnya sarana dan prasarana, fifty-fifty).
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Itu pasti mas. Sudah aturan dari pusat kalau soal itu.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari masing-masing SDM yang berbeda-beda ya. Kan gak semua SDM pelaksana paham seluruhnya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Hariyadi Supandi, S.Sos.
Waktu wawancara : Rabu, 5 November 2014
Instansi : Dinas Perhubungan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun pusat serta dari internet dan teman-teman dinas lain.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Dalam dinas ini sudah ada staff yang berkualifikasi kok soal SAP berbasis akruaI ini, walaupun ada juga yang belum berkualifikasi.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Pegawai keuangan yang ada saat ini sebenarnya sangat minim, akan tetapi pegawai yang ada saat ini sudah berlatar belakang yang sesuai dengan bidang keuangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang

- berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan dari PP No. 71 Tahun 2010 sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kami sudah mengikuti pelatihan itu.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Tidak ada masalah kalau untuk sarana dan prasarananya. Kami siap dalam penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sama kayaknya mas. Tidak ada masalah untuk sistem informasinya juga sudah baik.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Pimpinan selalu mensosialisasikan semua kebijakan yang akan diterapkan kepada pegawainya.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendalanya mungkin untuk menyesuaikan perubahan itu membutuhkan waktu yang agak lama, tidak bisa langsung beres pada saat awal penerapannya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Hidayat Rahman, S.Sos.
Waktu wawancara : Senin, 3 November 2014
Instansi : Dinas Pasar
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akreal.
- Responden : Iya, ada yang bisa saya bantu?
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akreal?
- Responden : Kami disini sudah mengetahui tentang PP No.71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP Berbasis Akreal (pedoman penyusunan laporan keuangan daerah).
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akreal?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis Akreal.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akreal?
- Responden : Komitmen kan kunci utama dalam suatu tujuan dari organisasi, jadi kami selalu memiliki komitmen dalam suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk perubahan yang lebih baik.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akreal?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis Akreal dalam jumlah yang cukup, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi dengan jumlah yang cukup untuk menunjang penerapan SAP Berbasis Akreal.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akreal?
- Responden : Belum mas, masih banyak pegawai keuangan kami yang berlatar belakang pendidikan non keuangan.

- Peneliti : Jadi, bagaimana kondisi kesiapan SDM dalam menerapkan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kondisi kesiapannya saat ini masih kurang, dari jawaban diatas kan sudah menggambarkan bagaimana kondisi SDM kami dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Serta minimnya dukungan dari organisasi dalam memberikan pelatihan atau pengembangan keahlian yang sesuai dengan fungsi tugas yang sesungguhnya.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sudah kok mas. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi/ pelatihan untuk pegawai keuangan untuk persiapan penerapan SAP berbasis akrual, tapi kami juga berharap kalau selain pemerintah, organisasinya sendiri juga mengadakan pelatihan.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana kami masih minim, masih perlu melakukan penyempurnaan. Kalau sarana yang ada tetap seperti ini, kami akan kesulitan dalam pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual. Kami sudah mengajukan permintaan pengajuan sarana penunjang seperti komputer dan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kalau sistem informasi kami sudah baik dan siap dalam penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Kebijakan dan prosedur SAP basis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan yang ada di dinas pasar ini.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari masing-masing SDM, ya mungkin karena SDM pelaksananya masih ada yang berlatar belakang pendidikan non keuangan.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Dra. RR Ninis Diana Ariyani
Waktu wawancara : Rabu, 5 November 2014
Instansi : Dinas Pertanian
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya mas, silahkan!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan dari media-media.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Komitmen kami selalu mendukung program pemerintah termasuk mendukung komitmen dalam penggunaan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Penempatan pegawai masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai.
- Peneliti : Jadi, bagaimana kondisi kesiapan SDM dalam menerapkan SAP

- berbasis akrual?
- Responden : Kondisi SDM saat ini belum mendukung karena masih banyak pegawai kami yang belum begitu paham makna dari SAP berbasis akrual itu, mungkin karena faktor penempatan pegawai keuangan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan pelatihan/ sosialisasi PP 71 tahun 2010 kepada seluruh pegawai keuangan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana kami masih belum siap jika harus mulai menerapkan SAP yang baru karena untuk membuat laporan keuangan dibutuhkan sarana yang lebih menunjang. Dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh dibutuhkan sarana prasarana yang lebih baik dan dapat menunjang segala aktivitas atas pelaksanaan SAP berbasis akrual. Sarana dan prasarana penunjangnya seperti komputer, jaringan internet untuk penghubung antar unit kerja.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kesiapan untuk sistem informasi sudah terintegrasi dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Sudah disosialisasikan kok kepada seluruh pegawai keuangan
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi di dinas kami yaitu masalah staff atau SDM pelaksana yang berkualifikasi belum cukup sehingga menghambat kesiapan dari faktor SDM itu sendiri. Selain itu, pemahaman terkait SAP Berbasis Akrual juga menjadi kendala yang harus segera diatasi, serta sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Ir. Chalid Seohartono
Waktu wawancara : Jum'at, 7 November 2014
Instansi : Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Belum seluruhnya pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan bagian keuangan.
- Peneliti : Jadi bagaimana kondisi kesiapan SDM dalam menerapkan SAP

- berbasis akrual?
- Responden : Kondisi kesiapan SDMnya masih 50%, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan penanganan terkait kemampuan dan pemahaman SDM di bagian keuangan untuk menyesuaikan dengan standar yang baru. Butuh dukungan pendampingan dari organisasi dalam persiapan penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sosialisasi dan pelatihan sudah pernah dilakukan tetapi standar yang baru ini lebih banyak dalam komponen yang harus dilaporkan, sehingga kami beserta staff masih membutuhkan waktu untuk mendalami pemahaman tentang itu semua.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana yang ada dibagian keuangan masih belum siap dalam penerapan SAP yang baru. Kondisi kami dengan SAP yang lama saja sebenarnya masih kesulitan. Dan kami telah mengajukan permohonan pengadaan sarana penunjang untuk penerapan SAP yang baru pada Bulan Januari. Semoga saja bisa cepat terealisasi.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kalau sistem informasi kami rasa tidak ada masalah. Saya rasa sistem informasinya sama saja dengan peraturan yang lama.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Untuk kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan jauh-jauh hari sebelum diterapkan secara penuh.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendalanya terkait SDM dan sarana penunjangnya. SDM disini kami masih belum memiliki staff berkualifikasi dalam jumlah yang cukup dan sarannya sendiri kurang mendukung untuk pelaksanaan aturan yang baru ini.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Drs. Mama Sudarma
Waktu wawancara : Kamis, 6 November 2014
Instansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Oh iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah kok mas. Sejak dikeluarkannya PP ini, kami sudah diberitahu dan diikutkan dalam sosialisasi terkait penerapan PP No. 71 tahun 2010.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saya beserta jajaran staff disini memiliki komitmen memajukan dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk komitmen terkait dengan penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Terkait dengan staff yang berkualifikasi dalam bidang keuangan, dinas kami tidak ada masalah. Dan siap untuk mengikuti dan menjalankan perubahan pedoman dasar penyusunan laporan keuangan.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Belum seluruhnya sih, tapi dengan komitmen untuk menerima perubahan ini jadi tidak masalah.

- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah sudah beberapa kali mengadakan pelatihan/ sosialisasi PP Nomer 71 Tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual yang bertujuan menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP Berbasis Akrual pada waktu yang telah ditetapkan.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarananya sudah bagus mas. Dinas kami baru saja mendapatkan bantuan sarana penunjang untuk SAP yang baru.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual sudah kami persiapkan.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari masing-masing SDM . Tidak semua SDM pelaksana paham seluruhnya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Susi Sulistyowati, SE.
Waktu wawancara : Rabu, 12 November 2014
Instansi : Dinas Koperasi dan UMKM
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya, silahkan!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 tetapi hanya sebatas teorinya saja, untuk penerapannya kami belum tau.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saya beserta jajaran staff disini memiliki komitmen untuk mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk komitmen terkait dengan penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff keuangan sudah berkualifikasi dalam jumlah yang cukup yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk penempatan pegawai/staff keuangan saat ini masih ada yang belum berlatar belakang pendidikan yang sejalan dengan bagian keuangan, hanya saja itu tidak menjadikan masalah dalam penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP

- Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP berbasis akrual sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dari pemerintah.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana sudah ada dan siap untuk implementasi SAP yang baru ini pada penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dinas kami ke BPKAD.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi selalu kami utamakan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk untuk urusan penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang terjadi saat ini adalah staff keuangan masih kebingungan bagaimana sebenarnya mekanisme dari SAP yang baru ini. Hal ini juga berkaitan dengan sarana yang menunjangnya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Kasmiran, SE.
Waktu wawancara : Rabu, 12 November 2014
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan!
Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
Responden : Kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari berbagai sumber, salah satunya dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
Responden : Jajaran staff keuangan sudah sesuai dengan standar kualifikasi yang telah ditentukan sebagai pelaksana dari penerapan SAP berbasis akruaI itu sendiri.
Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
Responden : Pegawai bagian keuangan sudah didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai hanya saja kami masih membutuhkan tambahan pegawai keuangan untuk mengisi kursi yang kosong.
Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP

- Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan/sosialisasi tentang SAP berbasis akrual sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana untuk penerapan SAP akrual sudah ada dan akan kami gunakan untuk menunjang penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP 71/2010.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi yang dibutuhkan dalam penerapan SAP akrual ini harus lebih baik dan kompleks mengingat penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang lebih banyak dan mendetail.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari masing-masing SDM yang berbeda-beda ya. Kan gak semua SDM pelaksana paham seluruhnya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Drs. Ec. Moh. Hasan, M.Si.
Waktu wawancara : Kamis, 6 November 2014
Instansi : Dinas Sosial
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Ada yang bisa saya bantu?
Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
Responden : Oh, itu sudah kok dek. Sejak keluarnya PP itu, kami sudah mendapat gambaran tentang isi dari PP 71 tahun 2010.
Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
Responden : Staff yang ada dibagian keuangan sudah cukup dan memiliki kemampuan/pemahaman untuk penerapan SAP berbasis akruaI.
Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
Responden : Sudah kok. Staff keuangan sudah didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai.
Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akruaI secara berkesinambungan?

- Responden : Pelatihannya sudah dilakukan secara berkesinambungan sejak keluarnya peraturan yang mengatur tentang SAP ini.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarananya sudah ok kok, dan sangat memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kalau sarananya saja siap, berarti sistem informasinya juga siap dong. Sistem informasi ini kan salah satu kunci utama dalam manajemen organisasi pemerintahan.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Dalam sistem informasi yang baik, semua kebijakan (khususnya kebijakan SAP) harus disosialisasikan keseluruhan pegawai keuangan.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari pelaksananya serta bagaimana pelaksananya menangkap pemahaman dari perubahan itu sendiri.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Drs. Bambang Hermanto
Waktu wawancara : Kamis, 6 November 2014
Instansi : DPU Bina Marga
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Oh iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Kami sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kemendagri. Untuk dasar pedomannya, kami dapat dari internet mas.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saya beserta jajaran staff disini memiliki komitmen terkait dengan penerapan SAP berbasis akruaI yang akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2015.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff keuangan kami sudah berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk penerapan SAP yang baru ini.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Penempatan pegawai keuangan sendiri belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. Akan tetapi pegawai keuangan yang ada sudah siap dalam penerapan SAP akruaI.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang

- berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Seluruh pegawai keuangan yang lama maupun yang baru sudah mendapatkan pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana penunjang dari penerapan SAP ini menjadi prioritas kami setelah SDM. Jadi kami selalu memperhatikannya agar dapat menunjang pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kesiapan sistem informasi sudah masuk dalam komitmen kami untuk mengikuti peraturan yang berlaku dan sebagai landasan dalam penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai (keuangan)
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi yaitu masalah sarana dan prasarana. Maksudnya, sarannya masih belum memfasilitasi dari kebijakan yang dikeluarkan terkait penyusunan laporan keuangan. Selama ini kita masih manual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Mestinya pemerintah juga menyediakan sarana penunjang yang memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Riris Ika, S.Sos.
Waktu wawancara : Kamis, 6 November 2014
Instansi : DPU Cipta Karya
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Silahkan mas!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini kami sudah mengetahui tentang adanya perubahan pedoman dasar dari PP 24 tahun 2005 ke PP 71 tahun 2010.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Penempatan pegawai juga belum didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. Mayoritas posisi dibagian keuangan ditempati oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan non keuangan.

- Peneliti : Jadi, bagaimana kondisi kesiapan SDM dalam menerapkan SAP berbasis akrual?
- Responden : Untuk kondisi SDM saya rasa masih kurang siap ya. Untuk menyusun laporan yang baru ini memerlukan pemahaman yang mantap. Sedangkan SDM kami masih belum begitu mantap dalam penguasaan teorinya. Faktor budaya dari SDM juga ikut turut andil dalam menerima perubahan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan dari PP 71 tahun 2010 sudah pernah dilakukan, hanya saja pegawai kami yang belum begitu paham dari maksud prosedur SAP akrual menjadikan kami kesulitan untuk menerjemahkan dalam penerapan penyusunan keuangan daerah.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarananya masih seadanya mas. Masih sangat minim sekali dan jika harus diterapkan aturan yang baru, kami rasa kami akan kesulitan untuk menyesuaikan dengan pedoman yang berlaku.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasinya juga masih belum bagus mas. Masih belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan PP 71/2010 ini.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Kebijakan dan prosedur SAPnya sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Dengan adanya perubahan ke PP yang baru ini, saya rasa itu sangat baik. Akan tetapi setiap perubahan pasti akan memiliki dampak salah satunya adalah faktor SDM penunjang, sarana dan prasarana penunjang akan menjadi hambatan jika tidak diperbaiki sistemnya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Rasyid Zakaria, S.Si.
Waktu wawancara : Rabu, 5 November 2014
Instansi : DPU Pengairan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Oh iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan dari media lainnya.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk mensukseskan dan mendukung rencana pemerintah dalam perubahan SAP ini.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Masih sebagian saja yang didukung oleh latar pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan.
- Peneliti : Jadi, bagaimana kondisi kesiapan SDM dalam penerapan SAP berbasis akruaI?

- Responden : Kondisinya masih belum siap kalau saat ini. Tetapi kami akan melakukan perbaikan terkait dengan SDM pelaksanaanya agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam penerapannya.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sosialisasi dan pelatihan sudah pernah dilakukan tetapi standar yang baru ini lebih banyak dalam komponen yang harus dilaporkan, sehingga kami beserta staff masih membutuhkan waktu untuk mendalami pemahaman tentang itu semua.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana di bagian keuangan kami siap menjalankan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kesiapan sistem informasi selalu kami utamakan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk untuk urusan penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Sudah. Seluruh pegawai telah menerima sosialisasi terkait dengan kebijakan dari SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi di dinas kami yaitu masalah staff atau SDM pelaksana yang berkualifikasi belum cukup sehingga menghambat kesiapan dari faktor SDM itu sendiri. Selain itu, pemahaman terkait SAP Berbasis Akrual juga menjadi kendala yang harus segera diatasi. Percuma dengan sarana dan sistem informasi yang menunjang, jika SDMnya belum siap.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Bahtiar, S.ST
Waktu wawancara : Senin, 3 November 2014
Instansi : Kantor Pemuda dan Olahraga
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Silahkan dek!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kemendagri dan Pemerintah Daerah itu sendiri.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff/pegawai keuangan kami sudah berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan siap untu penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Hanya sebagian saja. Terutama di pos penting seperti pimpinan dan wakilnya sudah sesuai dengan latar pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang

- berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Soal pelatihan PP 71 tahun 2010 sudah dilakukan secara berkesinambungan, baik yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana kami sangat mendukung untuk pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Begitu juga dengan sistem informasi yang terkait dengan pelaksanaan SAP berbasis akrual sudah kami persiapkan jauh-jauh hari agar nantinya kami tidak kesulitan dalam penerapan langsungnya di lapangan.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Sudah disosialisasikan kok.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi mungkin tingkat pemahaman dari pihak pelaksananya ya (SDM). Mungkin pelaksananya tidak langsung paham pada saat awal diterapkannya.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Supriyadi, SE.
Waktu wawancara : Rabu, 12 November 2014
Instansi : Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya, apa yaang bisa saya bantu?
Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari himbauan Kemendagri.
Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
Responden : Staff/pegawai keuangan kami sudah berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan siap untuk penerapan SAP berbasis akruaI pada waktu yang telah ditetapkan.
Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
Responden : Kondisi yang ada saat ini pegawai keuangan sudah didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai.
Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akruaI

- secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan dan sosialisasi telah dilaksanakan untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah menggunakan pedoman yang baru.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana tidak ada masalah kok. Hanya saja sebenarnya kami berharap adanya suatu software untuk laporan keuangan. Selama ini kami masih menggunakan excel, yang intinya masih manual.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasinya saya rasa sudah cukup bagus untuk menunjang pelaksanaan SAP yang baru ini.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi rata-rata sama semua antar dinas, yaitu terkait dengan budaya menerima perubahan. Maklum lah biasanya di Indonesia ini kan rakyatnya selalu kaget dengan namanya perubahan dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan itu sendiri.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Fauziah, S.Sos.
Waktu wawancara : Jum'at, 7 November 2014
Instansi : Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akruar.
- Responden : Iya, silahkan mas!
Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruar?
Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta dari media sosial.
Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruar?
Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis Akruar.
Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruar?
Responden : Staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruar.
Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruar?
Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis Akruar dalam jumlah yang cukup, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk menunjang penerapan SAP Berbasis Akruar.
Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruar?
Responden : Belum seluruhnya, masih ada yang dari latar pendidikan non keuangan.
Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP

- Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah sudah mengadakan pelatihan PP yang baru ini, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana dan prasarana bagian keuangan sudah memenuhi kriteria untuk pelaksanaan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi yang terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual tidak ada masalah. Sudah siap juga untuk menunjang pelaksanaan SAP berbasis akrual secara penuh.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Selalu ada sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan baru, termasuk kebijakan tentang SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi di dinas kami yaitu masalah staff atau SDM pelaksana yang berkualifikasi belum cukup sehingga menghambat kesiapan dari faktor SDM itu sendiri. Selain itu, pemahaman terkait SAP Berbasis Akrual juga menjadi kendala yang harus segera diatasi.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Drs. Dwi Hermanto
Waktu wawancara : Senin, 3 November 2014
Instansi : Kantor Lingkungan Hidup
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya. Apa yang bisa saya bantu?
Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi/pelatihan yang telah kami terima.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Masih lebih banyak pegawai yang berlatar belakang pendidikan non keuangan jika dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan keuangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP

- Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sudah sering mas, tapi ya gitu wes hanya sebatas pelatihan/ sosialisasi. Kami tidak tau bagaimana realnya nanti.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Nah, sarana dan prasarana ini juga menjadi hambatan bagi kami. Sarana dan prasarana kami masih belum bisa menunjang penerapan SAP kalau melihat dari bagaimana isi pedoman SAP itu sendiri
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi saya pikir sudah cukup bagus kok mas.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Soal itu sudah kok mas.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi itu, faktor SDM pelaksana yang belum siap untuk menerima perubahan sistem dan sarana penunjangnya yang berkaitan dengan perubahan tersebut juga perlu adanya penyesuaian.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Satrio Wicaksono, ST.
Waktu wawancara : Selasa, 4 November 2014
Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Kami beserta jajaran staff disini selalu berkomitmen untuk mensukseskan program perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk perubahan pedoman SAP.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan masih belum memiliki staff yang berkualifikasi dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI, sehingga sangat dibutuhkan SDM yang berkualifikasi untuk menunjang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Belum mas. Masih banyak yang berasal dari pendidikan non keuangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP

- Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Sosialisasi dan pelatihan sudah pernah dilakukan tetapi standar yang baru ini lebih banyak dalam komponen yang harus dilaporkan, sehingga kami beserta staff masih membutuhkan waktu untuk mendalami pemahaman tentang itu semua.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sarana kami masih belum memfasilitasi kami untuk menyusun laporan keuangan secara maksimal. Banyak kekurangan yang masih segera diperbaiki.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kami juga kebingungan untuk sistem informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Untuk kebijakan SAP berbasis akrual kami selalu diikutsertakan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh sekretariat Pemkab. Jember.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang dihadapi di dinas kami yaitu masalah staff atau SDM pelaksana yang berkualifikasi belum cukup sehingga menghambat kesiapan dari faktor SDM itu sendiri. Selain itu, pemahaman terkait SAP Berbasis Akrual juga menjadi kendala yang harus segera diatasi.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Bobby Arie Sandy, S.STP
Waktu wawancara : Selasa, 4 November 2014
Instansi : Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jember
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Oh iya, silahkan mas!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah PPKD / SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Seluruh pegawai (pegawai keuangan) berkomitmen, untuk selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Dalam sekretariat Pemkab. Jember, saya rasa staff/pegawai yang ada sudah berkualifikasi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan. Terutama untuk penerapan SAP berbasis akruaI yang lebih rumit dalam penyusunan laporannya, dibutuhkan SDM yang mencukupi untuk itu semua sesuai dengan keahliannya.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Kalau soal latar belakang pendidikan, saya rasa belum sesuai dengan bidangnya (bidang keuangan) masih ada sebagian yang

- lulusan non keuangan.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Itu sudah dilakukan beberapa kali, sejak keluarnya PP itu, pemerintah serius dalam melakukan pengembangan khususnya terkait SDM dengan melakukan pelatihan/sosialisasi baik ditingkat daerah maupun provinsi.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Saya rasa seluruh bagian-bagian yang ada di sekretariat ini tidak ada masalah soal sarana dan prasarananya. Dinas kita kan masuk dalam lingkungan sekretariat Pemkab. Jember jadi sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi dinas-dinas yang lainnya (SKPD).
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sama halnya sarana itu tadi kalau menurut saya.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Nah, kalau kebijakan-kebijakan sudah menjadi kewajiban pimpinan untuk mensosialisasikan kepada seluruh pegawainya, termasuk kebijakan tentang SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh PPKD / SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendalanya saya rasa cuma masalah penyesuaian dalam menerima perubahan itu saja. Kan masing-masing orang memiliki budaya yang berbeda dalam menerima perubahan, tapi saya yakin, itu dapat segera diatasi dengan berjalannya waktu.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya.
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Ribut Herlambang Widjajanto, SE.
Waktu wawancara : Senin, 10 November 2014
Instansi : RSD. Dr. Soebandi
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya, silahkan!
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Belum, kami menunggu Peraturan Daerah yang dikeluarkan Bupati yang mengatur pelaksanaan penerapan PP 71 Tahun 2010.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Secara komitmen, kami selalu mendukung program pemerintah termasuk komitmen dalam melaksanakan visi dan misi penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Untuk bagian keuangan, kami sudah memiliki pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akruaI harus memperhatikan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan khususnya pegawai keuangan yang akan mengerjakannya, dan seharusnya pegawai keuangan yang mengerjakannya adalah

pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai keuangan didukung dengan kesiapan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sehingga akan tercapai sesuai dengan tujuan penerapan SAP nantinya.

- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pemerintah telah melakukan pelatihan atau sosialisasi secara berkesinambungan sejak keluarnya PP Nomor 71 Tahun 2010 sampai tahun ini (2014).
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Untuk bagian keuangan sudah memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk penerapan SAP sesuai dengan pedoman PP Nomor 71 Tahun 2010.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kami selalu mengutamakan sistem informasi yang dibutuhkan, karena itu semua terkait dengan kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kami ke pusat.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Semua kebijakan yang baru maupun yang lama, sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, termasuk kebijakan tentang SAP akrual kepada pegawai keuangan.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang sering kami hadapi, biasanya terkait budaya SDM dalam menerima perubahan yang cenderung kurang cekatan. Mungkin kendala ini yang harus kami antisipasi sebelum PP yang baru ini benar-benar diterapkan secara penuh.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak pak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Pitoyo, SKM.
Waktu wawancara : Rabu, 12 November 2014
Instansi : RSD. Balung
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual.
- Responden : Silahkan dek.
- Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab. maupun Pemprov serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akrual?
- Responden : Belum, kami menunggu Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan penerapan PP 71 Tahun 2010 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban daerah.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Saya beserta jajaran staff memiliki komitmen untuk mendukung terciptanya perubahan yang lebih baik dalam dinas-dinas pemerintahan terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparasi.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Staff keuangan sudah memiliki kualifikasi dalam bidang keuangan dan siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru.
- Peneliti : Apakah pemerintah sudah mengadakan pelatihan tentang PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk menciptakan SDM yang berkualitas untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual secara berkesinambungan?
- Responden : Pelatihan tentang PP 71 Tahun 2010 sudah dilakukan secara

- berkesinambungan sejak keluarnya peraturan pemerintah tahun 2010.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kami sudah menyiapkan semua sarana dan prasarana penunjang untuk implementasi SAP berbasis akrual, sehingga pada saat sudah diterapkan kami bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh dibutuhkan sarana prasarana yang lebih baik dan dapat menunjang segala aktivitas atas pelaksanaan SAP berbasis akrual. Melihat kondisi yang ada saat ini, masih banyak sarana dan prasarana yang harus diperbaiki atau dikembangkan untuk penerapan SAP berbasis akrual. Tanpa adanya dukungan dari sarana prasarana dan sistem informasi yang baik, pelaksanaan SAP berbasis akrual tidak dapat berjalan secara optimal.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi yang ada saat ini dalam masa evaluasi, sehingga jika ada kelemahan nantinya dapat segerap diatasi pada saat mulai diterapkannya SAP akrual.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendalanya menurut kami itu ada pada bagaimana sistem (SDM dan sarananya) yang ada di pemerintahan harus diperbaiki agar dapat mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini dengan baik.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak pak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.

MANUSKRIP

- Responden : Jumani Jumainah, S.Sos.
Waktu wawancara : Senin, 10 November 2014
Instansi : RSD. Kalisat
- Peneliti : Saya mahasiswa dari Jurusan Akuntansi UNEJ, ingin melakukan penelitian tentang analisis kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis AkruaI.
- Responden : Iya, silahkan!
Peneliti : Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah anda dan staff yang ada disini sudah mengetahui tentang adanya PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI?
- Responden : Sudah, kami disini sudah mengetahui PP No. 71 tahun 2010 dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah serta dari media sosial.
- Peneliti : Apakah SKPD sudah mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang SAP berbasis akruaI?
- Responden : Saat ini PP No. 71 Tahun 2010 belum diterapkan, kita masih tunggu Peraturan Daerah tentang penerapan SAP Berbasis AkruaI.
- Peneliti : Apakah anda dan staff yang ada disini sudah memiliki kesiapan komitmen dalam menjunjung azas, visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff yang ada disini sudah memiliki komitmen dalam menjunjung dan mensukseskan azas visi dan misi penggunaan SAP berbasis akruaI di lingkungan pemerintahan.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Staff bagian keuangan kami sudah berkualifikasi dalam jumlah yang cukup untuk penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah penempatan pegawai didukung oleh latar pendidikan yang sesuai terkait penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Bagian keuangan kami sudah didukung oleh latar pendidikan yang sesuai untuk penerapan SAP berbasis akruaI.
- Peneliti : Apakah bagian keuangan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penerapan SAP berbasis akruaI?
- Responden : Sarana dan prasarnya sudah sangat menunjang untuk kegiatan di

- bagian keuangan termasuk dalam penyusunan laporan keuangan.
- Peneliti : Bagaimana kesiapan sistem informasi terkait dengan pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual?
- Responden : Sistem informasi selalu kami utamakan dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk untuk urusan penerapan SAP berbasis akrual.
- Peneliti : Apakah kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan?
- Responden : Semua kebijakan dan prosedur SAP berbasis akrual telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai keuangan.
- Peneliti : Apa kendala yang sering dihadapi oleh SKPD dalam persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual?
- Responden : Kendala yang sering dihadapi yaitu dalam menerapkan standar yang baru, mayoritas SDM pelaksanaannya masih sedikit kebingungan dan kerap membanding-bandingkan dengan standar yang lama.
- Peneliti : Kalau begitu, terima kasih banyak atas waktunya
- Responden : Iya, sama-sama.